

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR  
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERTANIAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1970-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Disusun Oleh:  
Merlin Anggraeni  
13804241055**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR  
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERTANIAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1970-2015**

**Disusun Oleh:**

**MERLIN ANGGRAENI**

**NIM. 13804241055**

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 19 Juni 2017

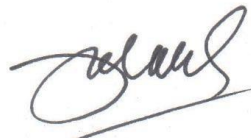
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi

Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,

Dosen Pembimbing



Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, M.Si.

NIP. 19751028 200501 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**


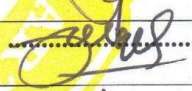
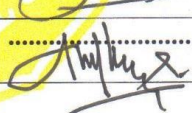
**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR  
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERTANIAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1970-2015**

Oleh:

**MERLIN ANGGRAENI  
NIM. 13804241055**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2017 dan dinyatakan lulus.

**Dewan Penguji**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
Mustofa, M.Sc.	Ketua Penguji		18 Juli 2017
Aula Ahmad Hafidh SF, M.Si.	Sekretaris Penguji		18 Juli 2017
Sri Sumardiningsih, M.Si.	Penguji Utama		17 Juli 2017

Yogyakarta, 20 Juli 2017  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta



**Dr. Sugiharsono, M.Si.**  
NIP.: 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merlin Anggraeni  
NIM : 13804241055  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor  
Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulis karya ilmiah yang lazim. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Penulis,



Merlin Anggraeni  
NIM. 13804241055

## **MOTTO**

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Mujadillah: 11)

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat).  
Seungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al Baqarah: 148)

Semua itu akan selesai pada waktunya, jadi nikmati saja prosesnya. (penulis)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak ( Bpk. Muhlison) dan Mama ( Ibu Nurul Chamidah) yang selalu mendukung dan mendoakan apapun yang anakmu lakukan untuk mencapai keberhasilan. Tugas akhir skripsi ini sebagai bukti dari keberhasilan kalian dalam mendidik putri satu-satunya kalian yang akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian.

Serta kamu yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dalam menjalani proses penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan keluarga besar dan orang-orang terdekat, berkat kalian semua skripsi ini dapat terselesaikan.

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR  
PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERTANIAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1970-2015**

**Oleh:  
Merlin Anggraeni  
NIM. 13804241055**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di beberapa sektor (pendidikan, kesehatan dan pertanian) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder Indonesia tahun 1970 sampai 2015. Teknik analisis data menggunakan analisis data *time series* dengan model ECM (*Error Correction Model*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 1,19 % dalam jangka panjang dan sebesar 1,58 % dalam jangka pendek. (2) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 0,37 % dalam jangka panjang dan sebesar 0,32% dalam jangka pendek. (3) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 0,06 % dalam jangka panjang dan sebesar 0,09% dalam jangka pendek. (4) Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel ECT sebesar -0.784920 menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi ekuilibrium selama 1 tahun 7 bulan.

**Kata Kunci** : *pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan, pertanian, pertumbuhan ekonomi.*

***AN ANALYSIS OF THE GOVERNMENT SPENDING TO EDUCATION,  
HEALTHY AND AGRICULTURE ON ECONOMIC GROWTH  
IN INDONESIA PERIOD 1970-2015***

**By:  
Merlin Anggraeni  
NIM. 13804241055**

**ABSTRACT**

This study aims to find out the effect of government spending in some sector ( education, health and agriculture) on economic growth Indonesia in long term and short term. This study employed the quantitative approach. The data were the secondary data in Indonesia from 1970 to 2015. Data analysis techniques use time series data analysis with ECM Model ( Error Correction Model).

The results of the study were as follows. (1) Government spending to education variable had a positive effect on GDP by 1,19 % in the long term and 1,58 % in the short term. (2) Government spending to health variable had a positive effect on GDP 0,37 % in long term and 0,32% in shorth term. (3) Goverment spending to agriculture variable had a positive effect on GDP by 0,06 % in long term and 0,09% in shorth term. (4) Goverment spending to education, health and agriculture variable simultaneously affected GDP in long term as well as in short term. ECT variable of -0.784920 returned to the equilibrium in 1 year 7 month.

**Keywords** : *Government spending, education, health, agriculture, economic growth.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015” ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sugiharsono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Tejo Nurseto, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan layanan jurusan Pendidikan Ekonomi.
3. Barkah Lestari, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi.
4. Aula Ahmad HSF, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang selalu sabar memberikan pembelajaran yang berharga dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Sri Sumardiningsih, M. Si., selaku Narasumber yang telah memberikan arahan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Mustofa, M.Sc., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran yang lebih baik dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses studi.
8. Pak Dating Sudrajat, selaku Admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan pelayanan jurusan yang sangat baik dan ramah.
9. Keluarga Pendidikan Ekonomi 2013 B yang sudah bersama sejak 4 tahun yang lalu.
10. HIMA Pendidikan Ekonomi 2014-2015 yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga yang tidak didapatkan di bangku kuliah.
11. Sahabat-sahabatku, Lani, Asa, Novi, Lisa, mba Lina, Restu, Noviana, Nafis, Dian, Desi, Epik, Shandi, Diah P dan lainnya.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam studi hingga terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dan dukungan baik yang bersifat moral maupun material dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

Penulis,



Merlin Anggraeni

NIM. 13804241055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teori.....	15
B. Penelitian yang Relevan .....	35
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Hipotesis Penelitian .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Desain Penelitian .....	45
B. Variabel penelitian.....	45

C. Definisi Operasional .....	46
D. Data dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Data .....	56
B. Hasil Pengujian.....	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Keterbatasan Penelitian.....	85
C. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pengeluaran pemerintah total tahun 1970-2015.....	5
2. Data jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama.....	8
3. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.....	34
4. Kriteria uji Durbin-Watson.....	54
5. Statistik data masing-masing variabel .....	57
6. Hasil Pengujian <i>Unit Root</i> Tingkat <i>level</i> .....	65
7. Hasil Pengujian <i>Unit Root</i> Tingkat <i>First Difference</i> .....	65
8. Hasil Uji <i>Johansen Cointegration</i> .....	66
9. Hasil Estimasi OLS .....	67
10. Hasil Estimasi ECM .....	68
11. Hasil uji Normalitas .....	69
12. Hasil uji Multikolinieritas.....	70
13. Hasil uji Heteroskedastisitas.....	71
14. Hasil uji Autokorelasi.....	71
15. Hasil uji Autokorelasi setelah koreksi autokorelasi .....	72
16. Hasil estimasi OLS.....	76
17. Hasil Estimasi ECM.....	76

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Perkembangan PDB Indonesia tahun 1995 sampai 2015.....	2
2. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Wagner.....	31
3. Kerangka Berfikir.....	43
4. Perkembangan PDB Indonesia tahun 1970-2015 dalam miliaran rupiah.....	58
5. Perkembangan pengeluaran pemerintah atas pendidikan tahun 1970-2015 dalam miliaran rupiah.....	60
6. Perkembangan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tahun 1970-2015 dalam miliaran rupiah.....	62
7. Perkembangan pengeluaran pemerintah atas pertanian tahun 1970-2015 dalam miliaran rupiah.....	63
8. Grafik uji Durbin-Watson.....	72

## LAMPIRAN

1. Data Mentah.....	90
2. Data PDB.....	92
3. Data Penelitian.....	94
4. Hasil Uji Deskriptif.....	96
5. Hasil uji <i>Augmented dickey-Fuller</i> .....	97
6. Hasil uji Kointegrasi.....	105
7. Hasil uji OLS.....	106
8. Hasil uji ECM.....	107
9. Hasil uji asumsi klasik.....	108

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan perekonomian suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha memacu tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak, dan menyumbang pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa sosial yang lebih besar seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan standar hidup.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada perekonomian Indonesia, PDB mengalami peningkatan setiap tahunnya dan laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Perkembangan produk domestik bruto di Indonesia pada 20 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.





Sumber : *Worldbank*

**Gambar 1. Perkembangan PDB Indonesia tahun 1995 sampai 2015**

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan PDB mengalami fluktuasi, bisa meningkat bisa juga menurun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Indonesia merupakan negara berkembang yang belum mencapai kondisi *steady state* dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena guncangan. Guncangan terlihat pada krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat PDB mengalami penurunan yang cukup besar sekitar 0,56% dari tahun sebelumnya. Dan pada 5 tahun terakhir, PDB Indonesia terus mengalami penurunan yang berarti laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga melambat. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki dua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berkaitan dengan jumlah uang beredar di

masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi (Sukirno, 2006:234). Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun bukan ke dalam belanja negara. Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu: *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Menurutnya, perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013: 328). Dalam menentukan komposisi APBN inilah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Teori terkait pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional dikemukakan oleh beberapa ahli. Hukum Wagner mengemukakan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap PDB yang didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang pada abad ke-19. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Sedangkan teori Peacock dan Wiseman berisi tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang tebaik. Menurut mereka meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar dan begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 1994: 171-174).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005: 163) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia(SDM), (2) sumberdaya alam(SDA), (3) pembentukan modal, dan (4)

teknologi. Dari keempat faktor tersebut, SDM memiliki peran yang paling penting karena SDM berperan sebagai pelaku ekonomi yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi. Semakin baik kualitas SDM suatu negara semakin baik juga SDM tersebut menggerakkan perekonomian negara. Jika dilihat dari sisi kebijakan APBN, pemerintah sangat serius dalam meningkatkan kualitas SDM dengan cukup tingginya pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya manusia pada suatu negara. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2015 Kualitas SDM Indonesia masih rendah yang ditandai dengan nilai indeks sebesar 0,684 dan Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara di dunia. IPM sendiri merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Anggaran pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik diharapkan mampu meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah. Selain itu, anggaran kesehatan akan meningkatkan angka harapan hidup. Serta anggaran ekonomi akan meningkatkan standar hidup layak. Dapat disimpulkan, pengeluaran yang dapat meningkatkan kualitas SDM dalam jangka pendek maupun panjang yaitu pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah berusaha meningkatkan investasi sumberdaya manusia yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM ditandai dengan adanya perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada setiap tahunnya,

meskipun mengalami keadaan yang fluktuasi. Hal ini selaras dengan peningkatan pengeluaran pemerintah total dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sisi belanja negara atau pengeluaran. Sebenarnya ada perubahan unsur pengeluaran dengan adanya desentralisasi. Sebelum desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sedangkan setelah desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran daerah. Namun, besarnya pengeluaran pemerintah baik sebelum maupun setelah desentralisasi masih sama tergantung proyeksi pendapatan negara. Perkembangan Pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Pengeluaran pemerintah (juta rupiah)**

Tahun	Total pengeluaran pemerintah
1970	327.418
1975	1.452.500
1980	5.505.200
1985	16.188.900
1990	27.048.700
1995	59.737.100
2000	197.030.300
2005	266.220.255
2010	7.252.430.000
2015	13.924.423.000

Sumber : Kementerian keuangan RI

Dari tabel diatas, pengeluaran pemerintah total tiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 1970 yang hanya sekitar 327,4 miliar rupiah menjadi sekitar 13.924 triliun rupiah pada kurun waktu 45 tahun, dimana perubahannya sekitar 4.000 kali lipat. Peningkatan pengeluaran pemerintah total yang pesat ini disebabkan utama oleh adanya inflasi dan peningkatan pendapatan

negara. Peningkatan pendapatan negara ini dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan akumulasi modal, peningkatan kualitas teknologi yang digunakan serta faktor lainnya. Pengeluaran pemerintah secara total meningkat belum berarti juga pengeluaran pemerintah di setiap sektor mengalami peningkatan tiap tahunnya. Karena besarnya pengeluaran pemerintah di setiap sektor bergantung pada keputusan pemerintah dalam menentukan komposisi APBN. Dari tahun 1970 sampai 2015, Indonesia sudah mengalami pergantian kepemimpinan seorang presiden selama 6 kali dimulai dari presiden Soeharto sampai kepemimpinan Joko Widodo. Berbeda pemimpin akan terjadi juga perbedaan kementrian dan perbedaan komposisi APBN di tahun ia menjabat.

Sektor pengeluaran pemerintah yang dianggap penting dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pengeluaran sektor pendidikan terdiri dari pengeluaran rutin ( biaya gaji guru, dana BOS, dan lainnya) dan pengeluaran pembangunan (pembangunan gedung sekolah, subsidi dan lainnya). Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dibagikan ke berbagai subsektor antara lain pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non-formal dan informal, kedinasan, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan, pendidikan keagamaan, litbang penelitian, pembinaan kepemudaan dan olahraga. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara ( Kemenkeu, 2017).

Pengeluaran kesehatan juga terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengeluaran di sektor kesehatan akan dibagi ke berbagai subsektor, antara lain obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana serta kesehatan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kemenkeu, 2017).

Sektor ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas sehingga memfokuskan hanya pada salah satu subsektornya. Sejak dulu Indonesia dianggap sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas dan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor ini. Sebagian masyarakat bekerja di sektor pertanian di buktikan pada data yang ada pada tabel 2. Tabel ini menunjukkan besarnya tenaga kerja yang bekerja pada setiap lapangan usaha di Indonesia pada tahun 2000-2015. Dari tahun 2000 sampai 2015, Pertanian menjadi sektor yang memiliki tenaga kerja terbesar dari pada lapangan usaha lainnya. Meskipun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2015, sektor ini masih menjadi sektor yang paling banyak diisi oleh tenaga kerja di Indonesia. Karena hal tersebut, sektor yang dianggap paling berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat adalah sub sektor pertanian. Pertanian juga terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan. Dimana pengeluaran pertanian ini digunakan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan pengairan.

**Tabel 2. Data jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama**

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2000	2005	2010	2015
1	Pertanian, dsb.	40.676.713	41.309.776	41.494.941	37.748.228
2	Pertambangan, Penggalian	451.931	904.194	1.254.501	1.320.466
3	Industri	11.641.756	11.952.985	13.824.251	15.255.099
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	70.629	194.642	234.070	288.697
5	Konstruksi	3.497.232	4.565.454	5.592.897	8.208.086
6	Perdagangan, dsb.	18.489.005	17.909.147	22.492.176	25.686.342
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.553.855	5.652.841	5.619.022	5.106.817
8	Lembaga Keuangan, dsb.	882.600	1.141.852	1.739.486	3.266.538
9	Jasa Kemasyarakatan, dsb.	9.574.009	10.327.496	15.956.423	17.938.926
	<b>Total</b>	<b>89.837.730</b>	<b>93.958.387</b>	<b>108.207.767</b>	<b>114.819.199</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pada penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ri Setia Utama (2015) dengan judul analisis pengaruh pengeluaran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia tahun 2007 – 2013 mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Dwi Bastias (2010) dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969-2009 menyatakan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel

pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh M. Siddik Bacin (2009) dengan judul pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta terhadap produk domestik regional bruto provinsi Sumatera Utara periode 1978-2007 menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sri Endang Wahyu (2011) dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengeluaran aparatur daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan besar koefisien 35,697. Penelitian yang relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Menik Fitriani Safari (2016) dengan judul analisis pengaruh ekspor, pembentukan modal, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap PDB sebesar 0,15% dalam jangka panjang dan sebesar 0,10% dalam jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh 5 peneliti belum menunjukkan konsistensi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Belum adanya penelitian yang meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun terbaru dan tidak ada yang memasukkan variabel pengeluaran sektor pertanian dalam penelitiannya padahal sebagian besar masyarakat masih berada pada sektor pertanian.



Dari beberapa paparan diatas, telah ditunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan kebijakan fiskal. Dimana kebijakan ini dilakukan dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah terutama dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai penggerak perekonomian. Didukung dengan teori Peacock dan Wiseman serta hukum Wagner yang menyatakan semakin tinggi pendapatan nasional keseluruhan maupun per kapita, secara relatif pengeluaran pemerintah juga semakin tinggi. Dan pengeluaran pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai investasi sumberdaya manusia. Dimana peningkatan SDM dapat dilakukan melalui 3 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini mengambil judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1970-2015”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Besarnya PDB Indonesia sejak 2011 sampai 2015 terus mengalami penurunan serta laju pertumbuhan ekonominya juga melambat.
2. Kualitas SDM indonesia masih rendah ditandai dengan nilai Indeks pembangunan manusia sebesar 0,684 dan menjadi peringkat 110 dari 187 negara di dunia.

3. Pengeluaran pemerintah total mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian tidak selalu meningkat.
4. Sudah ada kebijakan anggaran minimum sektor pendidikan dan kesehatan dalam undang-undang, tetapi belum diketahui bagaimana penerapannya.
5. Masih ada hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang belum konsisten.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Dari beberapa permasalahan yang ada, masalah besarnya PDB Indonesia yang terus mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2015 merupakan masalah yang paling penting. Besarnya PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Dalam faktor internal, sumberdaya manusia merupakan faktor utama yang menentukan besarnya PDB. Sedangkan berdasarkan kebijakan pemerintah, pengeluaran pemerintah juga diatur dalam kebijakan fiskal yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengeluaran pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai investasi sumberdaya manusia. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui 3 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berhubung cakupan bidang ekonomi terlalu luas, sehingga hanya digunakan bidang pertanian saja yang

dianggap penting karena sebagian besar masyarakat bekerja di bidang ini. Dari uraian diatas, Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah di beberapa sektor terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidikan, kesehatan dan pertanian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan.
- b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Peneliti menjadi tahu pengaruh pengeluaran pemerintah pada beberapa sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Bagi pengambil kebijakan

Sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dalam kebijakan terkait besarnya pengeluaran pemerintah yang sudah dilakukan dan menyediakan informasi bagi pemerintah dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah di periode selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian teori**

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

###### **a. Pengertian pertumbuhan Ekonomi**

Menurut para ahli, baik negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosial maupun campuran, semuanya sangat mendambakan pertumbuhan ekonomi. Berhasil tidaknya program-program pembangunan di negara-negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Menurut Sadono Sukirno (2013: 9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Secara konvensional, pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), begitu juga untuk tingkat regional (daerah) dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Cara menghitung PDB dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan pendapatan yang terdiri dari gaji, sewa, laba, dan bunga. Kedua, pendekatan pengeluaran yang dihitung dengan menjumlahkan

pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto (Mankiw, 2007: 17).

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto dalam suatu negara tertentu selama periode waktu tertentu. Dilihat dari pendekatan pengeluaran, salah satu unsur dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi**

Menurut Sadono Sukirno (2013: 429-432), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1) Tanah dan Kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang ada. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor utama ( pertanian dan pertambangan). Peranan penanaman barang pertanian untuk ekspor dan pertambangan minyak menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia adalah bukti nyata

besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi.

2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak penduduk akan meningkatkan tenaga kerja. Disamping itu sebagai akibat dari pendidikan, latihan dan pengalaman kerja penduduk akan semakin bertambah, maka produktivitas akan meningkat. Namun luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bergantung pada banyaknya pengusaha dalam ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan semakin tingginya jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal dan teknologi penting dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mempertinggi keefisienan kegiatan produksi, menimbulkan barang-barang baru dan meningkatkan mutu barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.



#### 4) Sistem sosial dan sikap masyarakat

Dalam negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi pengahalang pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas tinggi. Sikap masyarakat juga menentukan sampai mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sikap masyarakat yang memberi dorongan terhadap pertumbuhan antara lain sikap berhemat untuk berinvestasi, sikap menghargai kerja keras, dan kegiatan lain untuk mengembangkan usaha.

#### **c. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

##### 1) Teori Klasik Adam Smith

Tokoh klasik ini dipelopori oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: luas tanah, jumlah penduduk, jumlah barang dan modal dan teknologi yang digunakan. Menurut Sukirno (2006:247), teori pembangunan kaum klasik dalam garis besarnya mengemukakan pandangan berikut:

- a) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung kepada empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.

- b) Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu : upah para pekerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima pemilik tanah.
- c) Kenaikan upah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.
- d) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan besarnya pembentukan modal, apabila tidak terdapat keuntungan maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.
- e) Hukum hasil lebih yang semakin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan, tanpa adanya kemajuan teknologi, penambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, akan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

## 2) Teori Neo Klasik Sollow

Teori yang dikembangkan oleh Abramovits dan Sollow melihat dari sudut pandang penawaran. Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pertumbuhan modal, penduduk dan teknologi. Solow mengemukakan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Sukirno, 2013 : 437). Jika teori Sollow di

terapkan di Indonesia, maka teori menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja bukanlah yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tetapi kemahiran dan kepakaran tenaga. Kemahiran dan kepakaran tenaga kerja ini yang dapat disebut sebagai kualitas SDM. Sehingga agar pertumbuhan ekonomi terwujud, pemerintah harus lebih giat dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.

### 3) Teori Keynesian

Menurut Keynes dalam buku Sadono Sukirno (2000: 19), kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat yang wujud tidak selalu mencapai full employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi pengeluaran agregat. Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran agregat. Dimana salah satu komponen penting dalam agregat adalah pengeluaran pemerintah.

#### 4) Teori Harrod- Domar : Akumulasi modal

Teori ini mengemukakan bahwa investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output terus meningkat. Apabila perkembangan ekonomi hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi senantiasa harus diperbesar, agar pertumbuhan pendapatan dapat cukup menjamin penggunaan kapasitas produksi secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh (Subandi, 2011:57). Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah berperan sebagai salah satu investasi yang diberikan oleh pemerintah dalam mendorong pendapatan nasional.

## **2. Produk Domestik Bruto (PDB)**

### **a. Pengertian PDB**

Menurut Mankiw (2007 : 2), PDB merupakan nilai pasar dari semua barang yang diproduksi oleh sebuah negara dan dalam priode tertentu. PDB juga di definisikan sebagai produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. PDB merupakan salah satu ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu ( Sukirno, 2013:17).

## b. Metode perhitungan PDB

### 1) Pendekatan produksi

Dengan pendekatan Produksi (*production approach*) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Rumus perhitungan PDB pendekatan produksi adalah:

$$Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 + \dots + (PXQ)n$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas

### 2) Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Pendapatan dari faktor produksi ini, antara lain: kompensasi untuk pekerja (upah atau gaji), keuntungan perusahaan, bunga netto, pendapatan sewa dan keuntungan perusahaan. Rumus perhitungan PDB pendekatan pendapatan adalah:

$$Y = w + i + r + \pi$$

Keterangan :

Y : Pendapatan nasional

w : upah

i : bunga netto

r : sewa

$\pi$  : keuntungan

### 3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas out put yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M). Rumus umum untuk menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Nasional

C : Konsumsi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Sesuai dengan penelitian ini, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan PDB jika dilihat dari pendekatan pengeluaran.

### **3. Peranan pemerintah dalam Perekonomian**

Ketidakstabilan sosial, politik maupun ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi.

#### **a. Peran pemerintah**

Menurut Dumairy (1999: 157-158) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- 1) Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi sehingga terjadi optimalisasi dalam pemanfaatan dan efisiensi dalam produksi.
- 2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil, wajar dan merata ke setiap daerah.
- 3) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan mengembalikan perekonomian dalam keseimbangan jika terjadi disequilibrium.
- 4) Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

## **b. Kebijakan pemerintah**

Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter, fiskal dan kebijaksanaan keuangan nasional. Kebijakan pemerintah terdiri sebagai berikut:

- 1) Kebijakan moneter merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijaksanaan ini mengacu pada keseimbangan dinamis antara JUB dengan barang dan jasa dalam masyarakat.
- 2) Kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak.
- 3) Kebijaksanaan internasional merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan dan pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini berkaitan dengan neraca perdagangan dan pembayaran surplus dan defisit. Juga berhubungan dengan kebijakan menerima atau memberikan bantuan luar negeri.



#### **4. Pengeluaran pemerintah**

##### **a. Pengertian pengeluaran pemerintah**

Dalam buku Marzuki Ilyas (1989: 38) pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Soediyono (1992: 18) Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

##### **b. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah**

Menurut Sadono Sukirno dalam buku Marzuki Ilyas (1989:40) faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor yang bersifat ekonomi, adalah yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat.

- 2) Faktor bersifat politik dan sosial, adalah faktor yang memakai anggaran pengeluaran yang besar. Seperti menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

**c. Klasifikasi Pengeluaran pemerintah**

Menurut Suparmoko (2012: 57) pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) **Pengeluaran yang *self liquidating*** sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan balas jasa masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.
- 2) **Pengeluaran yang *reproduktif***, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 3) **Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif**, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan nasional dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
- 4) **Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif** dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang

meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.

- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.** Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.

Menurut Soediyono (1992: 20), Pengeluaran Pemerintah berdasarkan pos pengeluaran pemerintah yang ada di APBN dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) **Pengeluaran rutin** yaitu terkait biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- 2) **Belanja pembangunan** yaitu terkait biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat proses pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana ekonomi seperti pembangunan jalan raya, irigasi, listrik dan lain-lain; peningkatan sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan perumahan; peningkatan kapasitas pemerintah seperti pengembangan aparatur pemerintah.

#### **d. Teori pengeluaran pemerintah secara mikro**

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan

sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Menurut Mangkosuebrototo (1994:177-178) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran dan permintaan untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

- 1) Perubahan permintaan akan barang publik
- 2) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Perubahan kualitas barang publik
- 4) Perubahan harga faktor-faktor produksi

**e. Pengeluaran pemerintah secara makro**

Menurut sisi makroekonomi, pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dibagi ke dalam tiga golongan ( Mangkoesoeroto, 1994:169), yaitu:

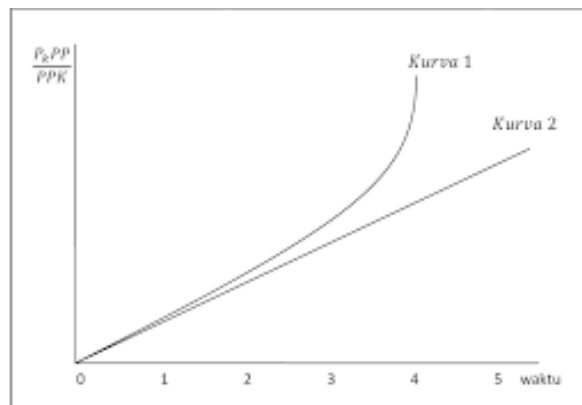
1) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Tahap awal perkembangan ekonomi, dimana investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Tahap menengah pembangunan ekonomi, peran pemerintah masih diperlukan tetapi peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peran pemerintah tetap besar karena peranan swasta yang semakin banyak ini menimbulkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang publik dalam jumlah kualitas yang lebih baik. Pada tahap tingkat ekonomi lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dalam hal ini, Indonesia masih masuk dalam ekonomi menengah dan masih berproses menuju ekonomi lanjut. Karena masih ada investasi pemerintah dan peran investasi swasta yang semakin membesar.

2) Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GDP yang didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang. Hukum wagner berisi apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran

pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum wagner ditunjukkan pada kurva di bawah ini.



Sumber: Mangkoesobroto, 1994:172

## **Gambar 2. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Wagner**

### 3) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin

meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh beberapa teori yaitu model pembangunan, hukum Wagner, teori Peacock dan Wiseman. Model pembangunan menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai investasi pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi baik dalam tahap awal, menengah maupun akhir. Hukum Wagner berisi teori bahwa pendapatan per kapita yang semakin meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah meningkat. Selain itu, Teori Peacock dan Wiseman juga mengungkapkan bahwa dalam keadaan normal, meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi GDP serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

## **5. Gambaran umum APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai alat pengelola perekonomian negara. Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan upaya untuk mulai menyusun pengelolaan keuangan negara. Di mulai sejak tahun 1950-an dirumuskan APBN, namun saat itu fungsinya hanya sebagai perhitungan sementara untuk memberikan patokan sebagai dasar pembuatan APBN di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1960 APBN menganut sistem berimbang dan dinamis yang menggantikan APBN dengan sistem Moneter pada jaman Orde Lama. APBN berimbang dan dinamis terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Selama masa krisis, APBN dalam periode 1998/1999-2000 menghadapi tekanan yang cukup berat akibat membengkaknya beban pengeluaran negara serta menyusutnya penerimaan negara. Kemudian muncul peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian penyusunan APBN Tahun Anggaran 2001 selain mengikuti standar internasional juga diselaraskan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut. Pada tahun 2005 pemerintah melakukan kebijakan perubahan format belanja negara. Perubahan format belanja negara tersebut dilandasi oleh Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan yang dimaksud adalah dengan menjalankan sistem penganggaran yang terpadu



(*unified budgeting system*), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan (Purwanto, 2006).

Tabel di bawah ini merupakan salah contoh format APBN.

**Tabel 3. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015**

	2015	
	APBN	RAPBNP
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.793.588,9</b>	<b>1.768.970,7</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.790.332,6</b>	<b>1.765.662,2</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.379.991,6</b>	<b>1.484.589,3</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.328.487,8	1.437.382,7
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	51.503,8	47.206,6
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>410.341,0</b>	<b>281.072,9</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>3.256,3</b>	<b>3.308,4</b>
<b>B Belanja Negara</b>	<b>2.039.483,6</b>	<b>1.994.888,7</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.392.442,3</b>	<b>1.330.766,8</b>
- Belanja K/L	647.309,9	779.536,9
- Belanja non K/L	745.132,4	551.229,9
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>647.041,3</b>	<b>664.121,9</b>
<b>1. Transfer Ke Daerah</b>	<b>637.975,1</b>	<b>643.355,7</b>
a. Dana Perimbangan	516.401,0	521.281,7
b. Dana Otonomi Khusus	16.615,5	
c. Dana Keistimewaan	547,5	547,5
d. Dana Transfer Lainnya	104.411,1	104.411,1
<b>2. Dana Desa</b>	<b>9.066,2</b>	<b>20.766,2</b>
<b>III. Suspen</b>	-	-
<b>C Keseimbangan Primer</b>	<b>(93.926,4)</b>	<b>(70.529,8)</b>
<b>D Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>(245.894,7)</b>	<b>(225.918,0)</b>
<i>% terhadap PDB</i>	<i>(2,21)</i>	<i>(1,90)</i>
<b>E. Pembiayaan</b>	<b>245.894,7</b>	<b>225.918,0</b>
I. Pembiayaan Dalam Negeri	269.709,7	244.537,1
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(23.815,0)	(18.619,1)
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	-	-

Sumber: Kementerian keuangan, 2015.

Anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2015 merupakan APBN yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga anggarannya dibagi menjadi anggaran pemerintah pusat dan daerah. APBN 2015 juga dibentuk setelah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga anggaran rutin dan pembangunan tidak dipisah tetapi digabungkan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Dwi Bastias (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009”. Data *time series* tersebut dianalisis menggunakan *Error Correction Model* (ECM) dan ditemukan kesimpulan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Persamaan terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu ECM dan variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan. Perbedaan terletak pada variabel lain yaitu pengeluaran pemerintah disektor perumahan dan transportasi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengeluaran di sektor pertanian. Perbedaan lainnya, penelitian tersebut periode yang diteliti tahun 1969 – 2009 sedangkan penelitian ini meneliti tahun 1970-2015.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ri Setia Utama (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia”. Data panel dianalisis menggunakan model *log* dan ditemukan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Persamaan terletak pada variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan. Perbedaan terletak pada variabel lain yaitu pengeluaran pemerintah disektor infrastruktur sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengeluaran di sektor pertanian. Perbedaan lainnya terletak pada alat analisis, subyek, waktu dan tempat penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Menik Fitriani Safari (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Data yang diteliti bersifat *time series* yang dianalisis menggunakan *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap PDB sebesar 0,15% dalam jangka panjang dan sebesar 0,10% dalam jangka pendek. Persamaan terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu *Error Correction Model* (ECM). Perbedaan terletak pada subyek, waktu dan tempat penelitian.
4. Penelitian dilakukan oleh M. Siddik Bancin (2009) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007”. Data yang diteliti bersifat *time series* dan dianalisis

menggunakan *ordinary least square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tak bebas, dengan tingkat kecocokan model sebesar 94,69%. Pengaruh terhadap PDRB, secara signifikan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai koefisien sebesar  $4,88E-7$ , investasi swasta  $1,56E-9$  dan tenaga kerja  $5,41E-7$ . Persamaan terletak pada salah satu variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Perbedaan terletak pada alat analisis, subyek, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dianalisis menggunakan *OLS* sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan *ECM*, subyek yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan pengeluaran pemerintah secara total sedangkan yang akan dilakukan menggunakan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor, periodenya tahun 1978 – 2007 sedangkan yang akan dilakukan pada periode 1970 – 2015 serta penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Indonesia secara keseluruhan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endang Wahyu (2011) dengan judul “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara”. Data yang diteliti bersifat *time series* dan dianalisis menggunakan *ordinary least square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran aparatur daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan besar koefisien 35,697. Persamaan terletak pada salah satu variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Perbedaan

terletak pada alat analisis, subyek, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dianalisis menggunakan *OLS* sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan *ECM*, subyek yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan pengeluaran pemerintah secara total sedangkan yang akan dilakukan menggunakan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor, periodenya tahun 1994 – 2008 sedangkan yang akan dilakukan pada periode 1970 – 2015 serta penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Indonesia secara keseluruhan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Utami (2006) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1975-2004”. Data yang diteliti bersifat *time series* yang dianalisis menggunakan *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel pengeluaran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Persamaan terletak pada variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah. Selain itu jenis penelitian ini sama-sama memiliki data *time series* dan analisisnya menggunakan *Eviews*. Perbedaan terletak pada periodenya, penelitian ini menggunakan data dengan periode 1975- 2004 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan data dengan periode 1970- 2015.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kemajuan Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan besarnya produk domestik bruto suatu negara. Di Indonesia, besarnya PDB dipengaruhi oleh berbagai hal. Berdasarkan kebijakan pemerintah, terdapat dua kebijakan yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dimana hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sehingga pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi besarnya PDB. Teori lainnya, yaitu teori Peacock dan Wiseman mengungkapkan semakin besar penerimaan suatu negara semakin besar pula pengeluaran pemerintah begitupun sebaliknya. Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi besarnya PDB dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dibentuk sebagai modal bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga masyarakat merupakan penggerak perekonomian. Menurut indeks pembangunan manusia, terdapat 3 bidang dalam memperbaiki kualitas manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi sangatlah luas, sehingga dikerucutkan kedalam satu subsektor yaitu pertanian.. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian dapat mempengaruhi besarnya PDB dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **1. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara. Dalam meningkatkan kualitas SDM, pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pengeluaran di sektor pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara. Dengan manusia sebagai *human capital*, peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan suatu negara. Teori *human capital* menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Investasi pendidikan mutlak dibutuhkan maka dari itu pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Tingginya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mampu meningkatkan sarana dan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat yang semakin baik akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam mendorong kegiatan perekonomian dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

## **2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi**

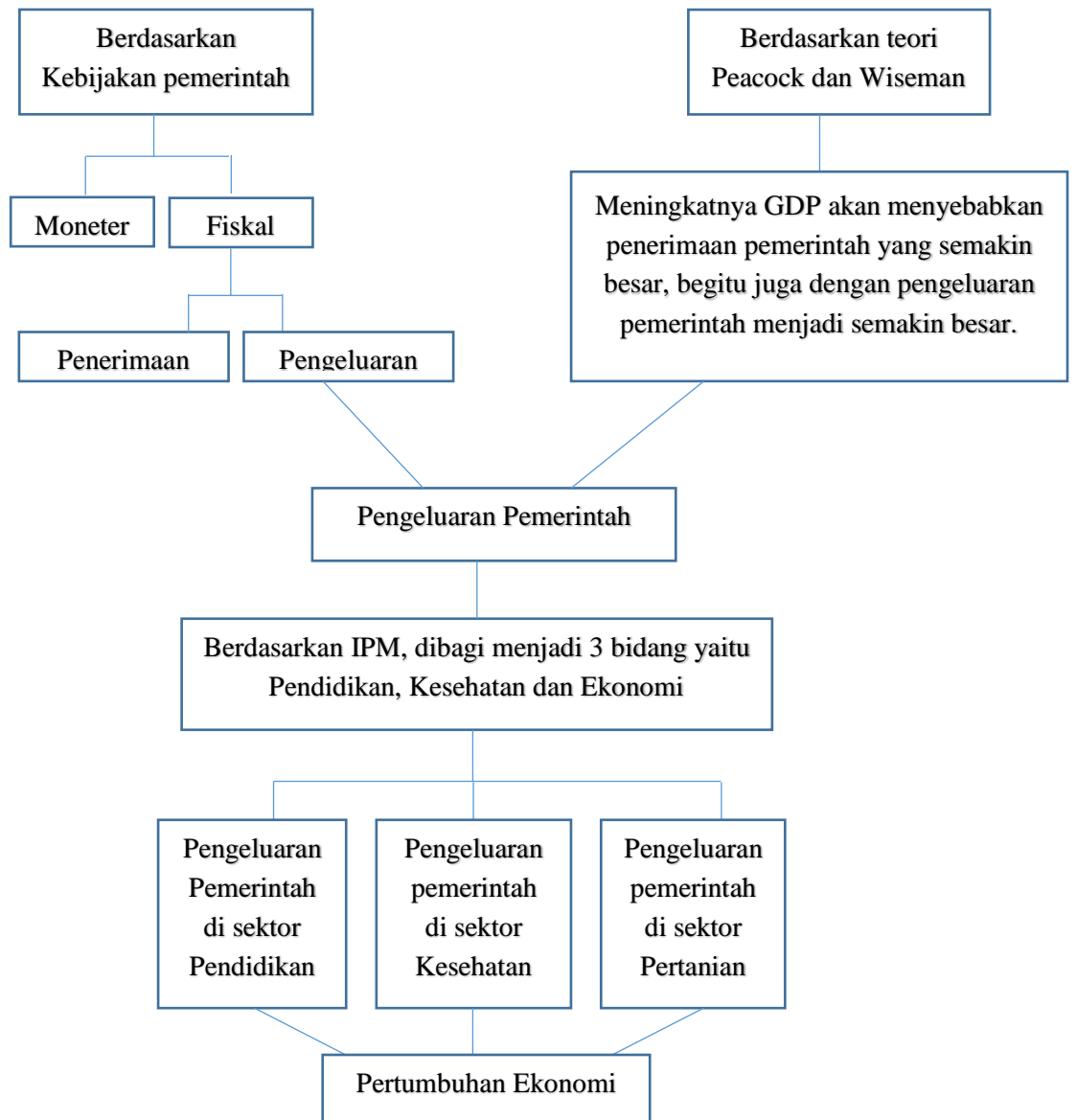
Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara. Dalam meningkatkan kualitas SDM, pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pengeluaran di sektor kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam UU no. 9 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5%. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, semakin tinggi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan semakin baik sarana prasarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Maka akan berimplikasi pada kesehatan masyarakat yang semakin membaik sehingga manusia dapat bekerja optimal sebagai *human capital*. Kemampuan yang optimal akan berpengaruh terhadap kinerjanya



dalam mendorong kegiatan perekonomian dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

### **3. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara. Dalam meningkatkan kualitas SDM, pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pengeluaran di sektor ekonomi mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi merupakan sektor yang memiliki cakupan sangat luas, sehingga dalam penelitian ini hanya difokuskan pada salah satu sub sektor dalam sektor ekonomi. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan yang sangat luas sehingga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Dimana ekonomi dalam negerinya masih di dominasi oleh ekonomi pedesaan sebagian besar dari jumlah penduduknya atau jumlah tenaga kerjanya bekerja di pertanian. Di Indonesia daya serap sektor tersebut pada tahun 2000 mencapai 40,7 juta lebih membuktikan bahwa sektor ini paling tinggi menyerap tenaga kerja. Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu dorongan investasi di sektor ini. Dengan adanya pengeluaran pemerintah di sektor pertanian diharapkan akan memicu kenaikan output yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.



**Gambar 3. Kerangka berfikir**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H2: Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H3: Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H4: Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan jenis data, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:6). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data *time series* dengan jumlah periode sebanyak 46 tahun.

#### **B. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:58). Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas, yaitu sebagai berikut.

##### **1. Variabel Terikat**

Variabel terikat (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Penelitian ini menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

## 2. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini menetapkan tiga variabel bebas, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan
- b. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan
- c. Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian

### C. Definisi Operasional

#### 1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan perekonomian suatu negara dalam satu tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional. Data Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari nilai PDB Indonesia tahun 1970-2015 yang bersumber dari data *Worldbank*. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

#### 2. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2015 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pendidikan. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

### 3. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor kesehatan dan keluarga berencana pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2015 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi kesehatan. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

### 4. Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian

Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk pertanian ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertanian dan pengairan pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2015 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pertanian. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

## **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan mempunyai sifat berkala (*time series*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran pemerintah dalam APBN tahun 1970-2015 dari Kementerian Keuangan RI. Sedangkan data lainnya yaitu data pertumbuhan ekonomi pada indonesia tahun 1970- 2015 dari data *Worldbank*. Data *Worldbank*

diambil karena lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh penurunan nilai mata uang rupiah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2010: 274) teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data besarnya pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu investasi yang tidak dapat seketika mempengaruhi output. Sehingga dalam jangka pendek, pengeluaran berupa konsumsi yang habis dibelanjakan tidak berpengaruh langsung terhadap output. Sedangkan dalam jangka panjang, investasi pemerintah memiliki efek terhadap peningkatan output. Maka dari itu teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis data *time series* dengan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*). Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8*.

## 1. ECM ( *Error Correction Model* )

ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek dan penyesuaiannya yang cepat untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya terhadap data *time series* untuk variabel-variabel yang memiliki kointegrasi. Pemodelan ECM merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi hubungan di antara variabel yang bersifat nonstasionary. Dengan syarat bahwa pada sekelompok variabel *nonstasionary* terdapat suatu kointegrasi, maka pemodelan ECM dinyatakan valid. Syarat ini dinyatakan dalam teorema representasi *Engle-Granger* (Ariefianto, 2012: 142).

Adapun pertimbangan penggunaan alat analisis ECM karena mampu menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan/hubungan ekonomi jangka panjang serta mampu mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi.

Persamaan model jangka panjang ditunjukkan oleh:

$$\text{LnGDP} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnEDUt} + \beta_2 \text{LnHEAt} + \beta_3 \text{LnAGRt} + \text{et}$$

Keterangan:

LnGDPt	= variabel PDB
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisiensi regresi variabel bebas kuantitatif
LnEDUt	= variabel pengeluaran atas pendidikan
LnHEAt	= variabel pengeluaran atas kesehatan
LnAGRt	= variabel pengeluaran atas pertanian
et	= Error Term

Jika variabel terikat dan variabel bebas berkointegrasi maka terdapat hubungan keseimbangan panjang antar variabel tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menjamin adanya keseimbangan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, *Error*



*correction term* (ECT) dalam uji kointegrasi bisa digunakan sebagai equilibrium error untuk menentukan perilaku variabel dependen dalam jangka pendek. Sehingga persamaan model jangka pendek ditunjukkan oleh:

$$D(\text{LnGDPt}) = \beta_0 + \beta_1 D(\text{LnEDUt}) + \beta_2 D(\text{LnHEAt}) + \beta_3 D(\text{LnAGRt}) + \beta_4 \text{ECT}$$

Keterangan:

- D(LnGDPt) = variabel PDB yang di-difference-kan pada orde pertama
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisiensi regresi variabel bebas kuantitatif
- D(LnEDUt) = variabel pengeluaran atas pendidikan yang di-difference-kan pada orde pertama
- D(LnAGRt) = variabel pengeluaran atas kesehatan yang di-difference-kan pada orde pertama
- D(LnPERt) = variabel pengeluaran atas pertanian yang di-difference-kan pada orde pertama
- ECT = Error Correction Term (residual lag 1)

ECM memiliki ciri khas dengan adanya unsur ECT (*Error Correction Term*). ECT merupakan residual yang timbul dalam metode ECM. Apabila koefisien ECT signifikan secara statistik yaitu koefisien ECT < 1 maka spesifikasi model yang digunakan adalah valid.

## 2. Uji Prasyarat

### a. Uji Stasioneritas

Data dikatakan stasioner apabila memiliki sifat nilai rata-rata serta varians yang konstan. Sebaliknya, suatu data yang nonstasioner adalah memiliki rata-rata serta varians yang berubah (baik ditentukan secara fungsional deterministik tertentu) maupun random (Ariefianto, 2012: 129). *Unit root* digunakan untuk mengetahui stasioneritas data. Pengujian unit root yang dipilih adalah *augmented Dickey- Fuller* (ADF). Langkah yang

dilakukan yaitu dengan menguji *unit root* pada level (1(0)). Dengan melihat nilai ADF, Jika nilai ADF lebih besar dari nilai kritis (5%) berarti data bersifat *nonstationer*. Sebaliknya jika nilai ADF lebih kecil nilai kritis berarti data bersifat *stationer*. Jika semua variabel bersifat *nonstationary*, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

#### **b. Uji Kointegrasi**

Adanya kointegrasi merupakan syarat penggunaan *Error Correction Model* (ECM). Hubungan kointegrasi dipandang sebagai hubungan jangka panjang (ekuilibrium). Untuk mendeteksi adanya kointegrasi, dilakukan pengujian *Johansen Cointegration*. Jika nilai hitung statistik uji yaitu *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* lebih besar dari nilai kritis maka hipotesis nol non-stasioner ditolak, yang berarti bahwa terdapat kointegrasi yang menjadi syarat ECM.

Pengujian kointegrasi antar variabel dapat dilakukan dengan metode *Engle-Granger* (1987) dan pendekatan *Johansen* (1988). Jika di dalam sebuah model terdapat lebih dari dua variabel, maka akan terdapat kemungkinan adanya lebih dari satu hubungan kointegrasi di dalam model tersebut. Secara umum, dengan jumlah variabel sebanyak  $n$ , maka jumlah hubungan kointegrasi di dalam model tersebut maksimal sebanyak  $(n-1)$ . Jika jumlah variabel di dalam model lebih banyak dari dua maka model tersebut tidak dapat diselesaikan dengan metode *Engle-Granger Test* karena metode ini hanya dapat mengakomodir maksimal sebanyak dua variabel dengan pendekatan

*single equation*-nya (Ariefianto, 2012: 142). Oleh karena itu, di dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Johansen Cointegration Test*. Apabila nilai *trace statistic* lebih besar dari *critical value*, begitu juga dengan nilai *max eige stat* lebih besar dari *critical value*, dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat kointegrasi di dalam model persamaan tersebut.

**c. Uji Asumsi Klasik**

Agar diperoleh penaksiran yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE), maka terhadap estimasi model penelitian tersebut perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

**1) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengambilan keputusan dengan *JargueBera test* atau *J-B test* yaitu apabila probabilitas  $>5\%$ , maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

**2) Uji Multikolinearitas**

Multikolinieritas merupakan suatu kuadran dimana satu atau lebih variabel dependennya dapat menyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Dan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel terikat. Multikol juga dapat dilihat dari *tolerance and variance inflation factor* (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksiran (*estimator*)

meningkat seandainya ada multikolinieritas dalam suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 1 dan  $R^2$  melebihi 0,9 maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi (Gujarati, 2006:70).

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Kondisi heteroskedastisitas merupakan kondisi yang melanggar asumsi dari regresi linear klasik. Heteroskedastisitas menunjukkan nilai varian dari variabel bebas yang berbeda, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam linear klasik adalah mempunyai varian yang sama atau homoskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Test* (Gujarati, 2006: 94). Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas *Obs\*R-squared*-nya. Jika nilai probabilitas *Obs\*R-squared* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar variabel bebas pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Dalam model regresi linier berganda juga harus bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Kriteria uji DW sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-dl < d < 4dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$Du < d < 4-du$

Sumber: Gujarati, 2006:122.

#### d. Uji Statistik

##### 1) Uji signifikansi simultan

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel terikat berpengaruh terhadap variabel bebas dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi regresi yang diestimasi layak atau tidak. Apabila nilai probabilitas F hitung kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan model regresi yang diestimasi layak.

##### 2) Uji signifikansi parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikatnya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau  $\alpha=5\%$ . Apabila probabilitas t- statistik kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya probabilitas t- statistik lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikatnya.

### 3) Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel bebas. Nilai  $R^2$  mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted*  $R^2$ ) yang mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *adjusted*  $R^2$  semakin mendekati satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat berasal dari hasil analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan *software EViews 8* dengan menggunakan analisis data *times series* model ECM (*Error Correction Model*) pada periode 1970-2015.

#### **A. Deskripsi Data**

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari dokumen APBN milik kementerian keuangan dan laporan yang dipublikasikan oleh *World Bank*. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan data PDB, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian periode tahun 1970-2015 dengan jumlah observasi sebanyak 46 tahun. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu Pertumbuhan ekonomi dan 3 variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian. Untuk mengetahui karakteristik data masing-masing variabel tersebut digunakan statistik data. Statistik data digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 5. Menunjukkan statistik data masing-masing variabel

	GDP	EDU	HEA	AGR
Mean	2054441.	23762.40	4824.797	3806.557
Median	310126.1	3383.632	1046.941	1014.856
Maximum	11890379	146392.8	21113.20	19925.50
Minimum	3650.248	22.46064	7.793596	27.06407

Sumber : Lampiran 2

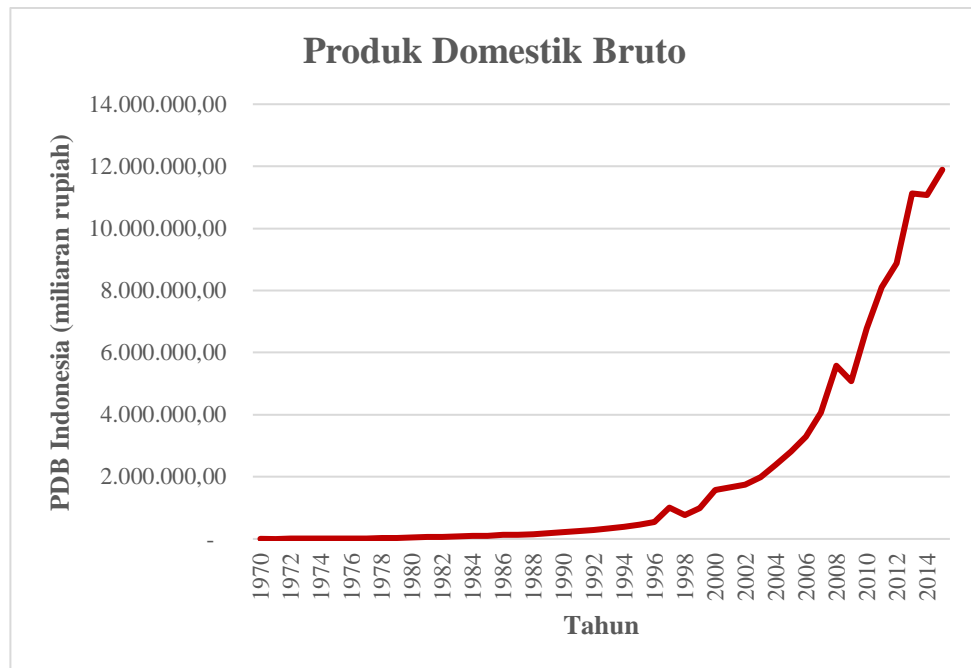
Berdasarkan statistik data yang telah disajikan pada tabel, dapat diketahui selama tahun 1970-2015 rata-rata variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu PDB sebesar 2.054,4 triliun. Pada variabel bebas, rata-rata tertinggi dialami oleh variabel EDU sebesar 23,7 triliun. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20% APBN. Sedangkan rata-rata terendah dialami oleh variabel AGR hanya sebesar 3,8 triliun. Nilai tengah dari variabel GDP sebesar 310,1 triliun. Nilai tengah tertinggi dari ketiga variabel bebas masih dialami EDU sebesar 3,3 triliun sedangkan nilai tengah terendah juga masih dialami oleh variabel AGR sebesar 1,01 triliun. Nilai GDP tertinggi dialami pada tahun 2015 dan terendah dialami pada tahun 1970. Dari ketiga variabel bebas, yang memiliki nilai tertinggi masih dialami oleh variabel EDU pada tahun 2015, sedangkan yang terendah justru dialami oleh variabel HEA pada tahun 1970.

Gambaran dari variabel dependen dan masing-masing variabel independen sebagai berikut:

### **1. Deskripsi Produk Domestik Bruto**

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jumlah data PDB yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 46 tahun, mulai tahun 1970 hingga tahun 2015.





**Gambar 4. Perkembangan PDB Indonesia tahun 1970-2015**

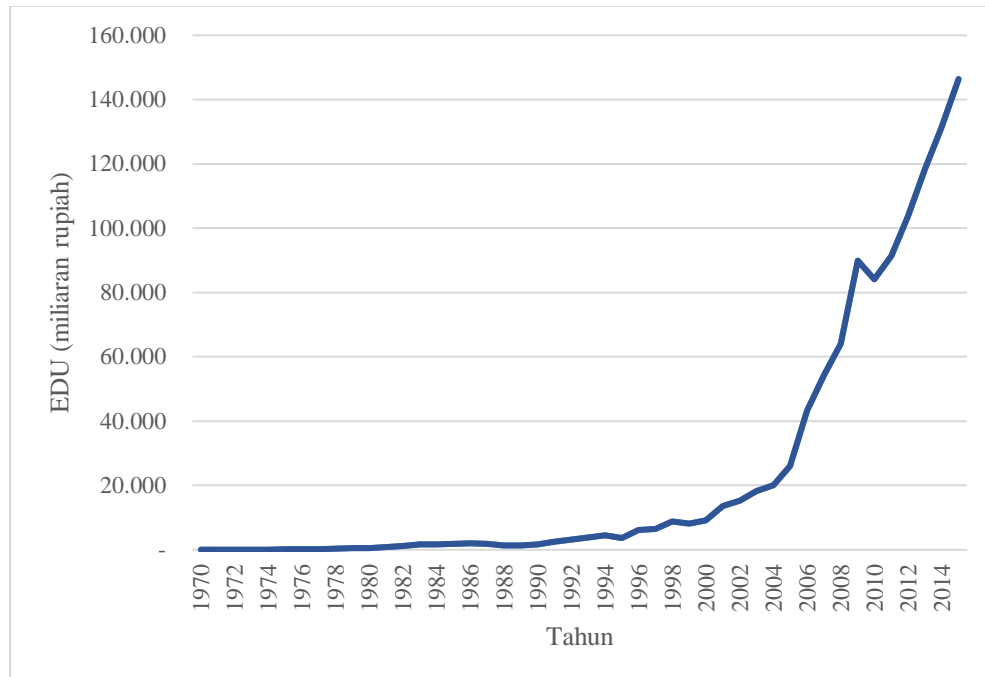
**(miliaran rupiah)**

Pada grafik tersebut, terlihat secara umum PDB meningkat dari tahun ke tahun. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan krisis ekonomi pada tahun 2008. Terjadinya krisis keuangan Asia pada pertengahan tahun 1997 dan semakin parah pada tahun 1998 terjadi penurunan nilai PDB yang cukup besar. Dimana PDB pada tahun 1998 hanya sebesar 765.950,52 miliar rupiah. Selain karena inflasi yang tinggi akibat krisis, keadaan Indonesia semakin parah dengan utang luar negeri yang jatuh tempo bersamaan, dan kerusakan *overhead* ekonomi dan *overhead* sosial Indonesia. Jika dilihat secara tren, 5 tahun terakhir PDB Indonesia dalam rupiah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sekitar 8.097 triliun hingga 2015 sekitar 11.809 triliun. Terjadi sekali penurunan sebesar 4% pada tahun 2014 dari 11.122 triliun menjadi hanya sekitar 11.077 triliun. Apabila

memperhatikan nilai mata uang rupiah, dimana tahun 2011 satu dollar senilai dengan 9.068 rupiah sedangkan pada tahun 2015 satu dollar senilai 13.795 rupiah. Sehingga jika di kurskan justru PDB Indonesia mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2015. Pada periode 2013 PDB Indonesia menurun sebesar 1 %, pada periode 2014 menurun sebesar 2,4 % dan periode 2015 menurun sebesar 3,2%. Secara global, nilai GDP Indonesia pada tahun 2015 menggambarkan 1,39 persen perekonomian dunia.

## **2. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan**

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental bagi sebuah negara. Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Keseriusan pemerintah sudah ditunjukkan dengan adanya UU no. 20 tahun 2003 yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja negara. Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dari tahun 1970 sampai 2015 dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.



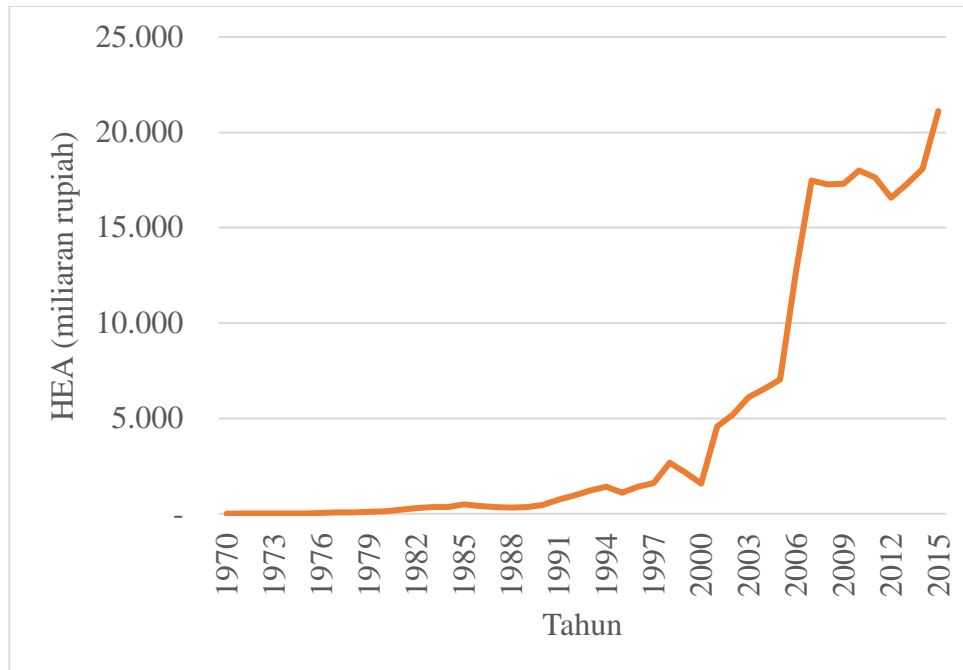
**Gambar 5. Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tahun 1970-2015 (miliaran rupiah)**

Jika dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 1970- 2015 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki tren yang meningkat. Pada periode 1970- 2003, anggaran pendidikan memiliki tren yang konstan karena memang terjadi kenaikan dan penurunan tetapi tidak terlalu banyak. Rata-rata perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan hanya berkisar antara 0,1-0,9 persen. Pada periode krisis 1998 anggaran pendidikan tidak mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan sektor pendidikan merupakan sektor yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga meskipun terjadi krisis pemerintah tetap harus menyediakan pelayanan pendidikan. Sebenarnya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari belanja negara sudah ada sejak UUD 1945 pasal 31, tetapi kenaikan anggaran yang cukup signifikan terjadi sejak tahun 2003 saat adanya UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Dalam UU ini,

anggaran pemerintah minimal 20% dari belanja negara dipertegas lagi, sehingga pemerintah lebih serius dalam merealisasikan anggaran pendidikan. Sejak tahun 2003 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terus meningkat hingga sekarang.

### **3. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan**

Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor kesehatan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Keseriusan pemerintah sudah ditunjukkan dengan adanya UU no. 9 tahun 2009 tentang kesehatan yang mewajibkan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara. Perkembangan pengeluaran pemerintah atas kesehatan dari tahun 1970 sampai 2015 dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini.



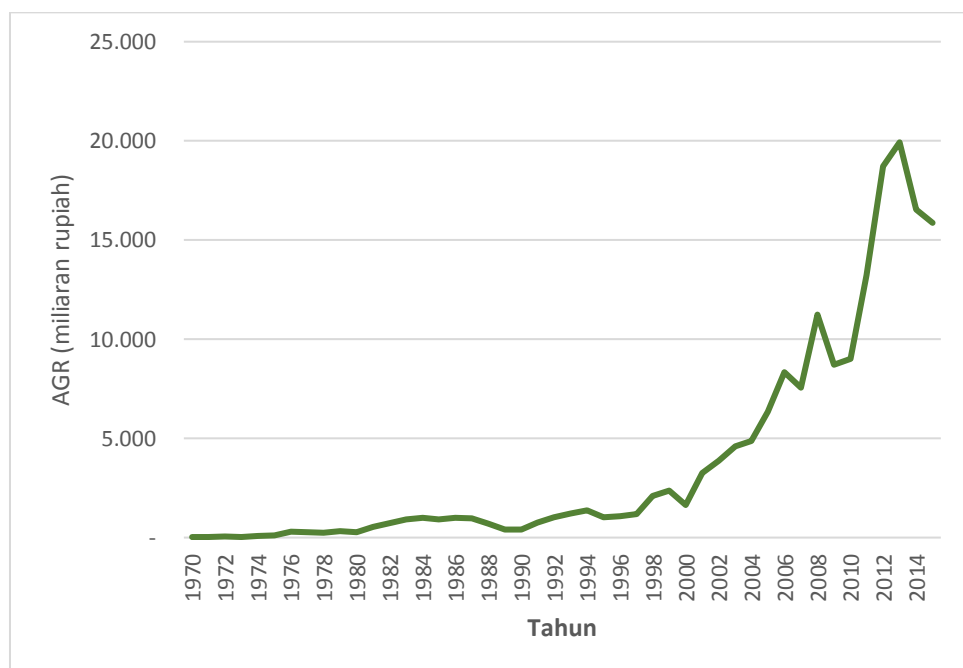
**Gambar 6. Perkembangan pengeluaran pemerintah di Sektor kesehatan tahun 1970-2015 (miliaran rupiah)**

Periode tahun 1970-1995 anggaran pemerintah di sektor sektor kesehatan cenderung konstan. Pemerintah orde baru saat itu tidak banyak mengeluarkan kebijakan di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan hanya terpusat pada kota-kota. Pada masa itu juga tidak ada banyak program kesehatan dicanangkan selain program keluarga berencana dan beberapa pengentasan penyakit menular. Masa krisis 1997 merupakan masa terjadinya perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Setelah krisis pemerintah mengeluarkan program-program terkait perbaikan sektor kesehatan. Hal ini kemudian meningkatkan pengeluaran pemerintah atas kesehatan hingga 40 persen yaitu 1.600.976.082.000 rupiah pada tahun 1997 dan meningkat hingga 2.679.984.507.000 rupiah pada tahun 1998. Sejak tahun 2004, pemerintah menerbitkan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sehingga salah satu program pemerintah yaitu program Jamkesmas untuk

pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Sejak tahun 2009 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang cukup baik hingga sekarang.

#### 4. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan bagian dari sektor penting dalam suatu negara, yaitu sektor ekonomi. Sektor ekonomi merupakan sektor yang menentukan kesejahteraan suatu negara. Semakin baik keadaan sektor ekonominya, semakin sejahtera negara tersebut. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 32%, lebih besar dari lapangan usaha lainnya. Sehingga pemerintah juga perlu optimal dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian. Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dari tahun 1970 sampai 2015 dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini.



**Gambar 7. Perkembangan pengeluaran pemerintah di Sektor pertanian tahun 1970-2015 (miliaran rupiah)**

Periode tahun 1970-2000 anggaran pemerintah di sektor kesehatan cenderung meningkat meskipun peningkatannya hanya sekitar 1 – 30%. Dilihat dalam grafik, setelah periode 2000 pengeluaran pemerintah di bidang pertanian mengalami peningkatan yang cukup baik hingga 2013. Selama periode ini, pengeluaran pemerintah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013, karena pengeluaran pemerintah untuk pertanian cukup diperhatikan. Anggaran pertanian ini digunakan berbagai program untuk memperbaiki kualitas pertanian di Indonesia. Namun setelah tahun 2013 justru anggaran pertanian mengalami penurunan, hal ini terjadi sejak pergantian presiden. Pada periode 2013 anggaran pertanian sebesar 19.925,5 Miliar rupiah dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 16.527,1 Miliar rupiah serta turun lagi pada tahun 2015 menjadi 15.879,3 Miliar rupiah.

## **B. Hasil Pengujian**

### **1. Uji Prasyarat**

Penelitian ini menggunakan estimasi data *time series* pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mengestimasi data *time series* peneliti menggunakan pemodelan *Error Correction Model*. Sebelum menggunakan ECM, harus dilakukan uji *unit root* untuk mengetahui apakah data tersebut *nonstationary* dan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki kointegrasi sebagai syarat pemodelan ECM. Hasil uji *unit root* dan uji kointegrasi sebagai berikut.

**a. Uji Stasioneritas**

Uji stasioneritas atau uji *unit root* bertujuan untuk memverifikasi bahwa data dalam penelitian bersifat *stasioner*. Uji stasioneritas dalam penelitian ini menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dengan melihat nilai probability -nya. Jika nilai ADF lebih besar dari nilai kritis (5%) maka berarti data *nonstasioner*. Sebaliknya jika nilai ADF lebih kecil nilai kritis berarti data bersifat *stasioner*.

Tabel 6. Hasil Uji Stasioner dengan ADF (tingkat level)

Variabel	Nilai ADF
Ln_GDP	0.414354
Ln_EDU	1.681264
Ln_HEA	0.980904
Ln_AGR	0.519690

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai ADF pada semua variabel lebih besar dari nilai kritis sebesar (0,05). Dapat disimpulkan bahwa data variabel PDB, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian bersifat tidak stationer. Karena semua data variabel dalam penelitian bersifat *nonstasioner* pada level atau  $I(0)$ , maka diperlukan adanya uji derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat berapakah data akan stasioner. Uji derajat integrasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Stasioner dengan ADF (tingkat *First Difference*)

Variabel	Nilai ADF
Ln_GDP	-5.383279
Ln_EDU	-5.303867
Ln_HEA	-6.140614
Ln_AGR	-6.151757

Sumber: Lampiran 3



Berdasarkan hasil uji tabel 7, nilai ADF pada semua variabel lebih kecil dari nilai kritis (0,05) sehingga semua data yang diujikan stasioner pada tingkat *first difference*. Setelah data bersifat stasioner pada uji *first difference* maka dilanjutkan dengan uji kointegrasi.

**b. Uji Kointegrasi**

Uji kointegrasi merupakan uji selanjutnya setelah uji *unit root*. Hubungan kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang (ekuilibrium). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui adanya hubungan kointegrasi dilakukan uji *Johansen Cointegration*. Apabila *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diketahui bahwa terdapat kointegrasi. *Johansen Cointegration Test* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji *Johansen Cointegration*

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.789188	129.9837	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.613509	61.48501	29.79707	0.0000
At most 2 *	0.350275	19.65658	15.49471	0.0111
At most 3	0.015415	0.683546	3.841466	0.4084
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.789188	68.49873	27.58434	0.0000
At most 1 *	0.613509	41.82843	21.13162	0.0000
At most 2 *	0.350275	18.97303	14.26460	0.0084
At most 3	0.015415	0.683546	3.841466	0.4084

Sumber : lampiran 4

Tabel 8 menunjukkan hasil uji *Johansen Cointegration* yang digunakan untuk mengetahui hubungan kointegrasi. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa nilai *Trace Statistic* sebesar 129.9837 lebih besar dari nilai kritis sebesar 47.85613 dengan taraf signifikansi 5%. Begitu juga nilai *maximum Eigenvalue* sebesar 68.49873 lebih besar dari nilai kritis sebesar 27.58434 dengan taraf signifikan 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang diantara variabel di dalam model persamaan tersebut.

## 2. Regresi jangka panjang (OLS)

Model *Ordinary Least Squares* dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka panjang. Berikut hasil estimasi jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Berhubung dalam uji klasik terdapat autokorelasi, sehingga hasil OLS yang diambil adalah hasil uji OLS setelah adanya koreksi autokorelasi menggunakan metode cochrane orcutt:

Tabel 9. Hasil estimasi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.462983	0.620844	5.577859	0.0000
BARU_EDU	1.197529	0.196858	6.083198	0.0000
BARU_HEA	0.370760	0.145796	2.543014	0.0152
BARU_AGR	0.066870	0.194018	0.344659	0.0497

Sumber: lampiran 5

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode OLS adalah sebagai berikut:

$$GDP_t = 3.462983 + 1.197529EDU_t + 0.370760HEA_t + 0.066870AGR_t + \mu$$

Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka panjang probabilitas untuk variabel EDU sebesar 0.0000, HEA sebesar 0.0152 dan AGR sebesar 0.0497. Variabel EDU, HEA dan AGR signifikan pada taraf 5%. Setelah sebelumnya melakukan uji prasyarat untuk menentukan model estimasi, diketahui bahwa data bersifat tidak stasioner pada tingkat level dan terjadi kointegrasi maka model sebaiknya menggunakan estimasi ECM.

### 3. Regresi jangka pendek (ECM)

*Error Correction Model* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek dan penyesuaiannya yang cepat untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya terhadap data *time series* untuk variabel-variabel yang memiliki kointegrasi. Hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa data tidak stasioner di tingkat level dan terkointegrasi maka dilakukan estimasi ECM. Berikut tabel hasil regresi model ECM. Berhubung dalam uji klasik terdapat autokorelasi, sehingga hasil ECM yang diambil adalah hasil uji ECM setelah adanya koreksi autokorelasi menggunakan metode *cochrane orcutt*:

Tabel 10. Hasil estimasi ECM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.381927	0.400770	9.529901	0.0005
D(BARU_EDU)	1.589343	0.195405	8.133566	0.0000
D(BARU_HEA)	0.324361	0.155848	2.081267	0.0241
D(BARU_AGR)	0.093974	0.194301	0.483654	0.0473
U(-1)	-0.784920	0.173399	-4.526664	0.0001

Sumber: lampiran 6

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode ECM adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln\_GDP} = 0.381927 + 1.589343 \text{ Ln\_EDU} + 0.324361 \text{ Ln\_HEA} + \\ 0.093974 \text{ Ln\_AGR} - 0.784920 \text{ Resid}(-1)$$

Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka pendek probabilitas untuk variabel EDU sebesar 0.0000, HEA sebesar 0.0241 dan AGR sebesar 0.0473. Variabel EDU, HEA dan AGR signifikan pada taraf 5%. Selain itu, ditemukan pula bahwa probabilitas RES(-1) atau *Error Correction Term* (ECT) sebesar 0,0001 dengan nilai koefisiennya sebesar -0.784920. Nilai koefisien ECT bernilai negatif dan secara absolut kurang dari 1 sehingga dapat diartikan bahwa spesifikasi model ECM valid untuk digunakan.

#### 4. Uji Asumsi klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji *Jarque-Bera* (JB test). Apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

Series	Skewness	Kurtosis	Jarque-Bera	Prob.
Residuals	-0,248695	2,288715	1.443870	0,485811

Sumber: Lampiran 7

Dari hasil uji *Jarque-Bera* (JB) dapat diketahui bahwa nilai JB adalah sebesar 1,443870 dengan probabilitas 0,485811. Karena nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dilihat dari *tolerance and variance inflation faktor* (VIF), apabila nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000230	2.255297	NA
D(LN_EDU)	0.033352	4.730436	2.376639
D(LN_HEA)	0.017889	3.209766	2.187100
D(LN_AGR)	0.010065	2.159929	1.785705
ECT	0.010878	1.304854	1.304852

Sumber: lampiran 7

Dari Tabel 12 hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa semua nilai VIF kurang dari 10. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau hubungan antarvariabel bebas di dalam model regresi.

## c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model memiliki varians yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji *White Heteroscedasticity*. Apabila nilai probabilitas *Obs\*R-squared* lebih besar

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heterokedastisitas:

Tabel 13. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.158043	Prob. F(14, 30)	0.3537
Obs*R-squared	15.78719	Prob. Chi-Square(14)	0.3265

Sumber: Lampiran 7

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada tabel dapat diketahui bahwa nilai *Obs\*R-squared* adalah sebesar 15.78719 dengan probabilitas sebesar 0,3265. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi diantara residual dalam model atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari gejala autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin- Watson*. Apabila nilai statistik D-W lebih dari 2 dan kurang dari 4-2, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 14. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	7.785489	Prob. F(2,40)	0.0014
Obs*R-squared	12.88919	Prob. Chi-Square(2)	0.0016
Durbin-Watson Stat	1.639321		

Sumber: Lampiran 7

Dari hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai statistik D-W sebesar 1,639321. Karena n dalam penelitian ini sebanyak 46 dan memiliki 3

variabel bebas, maka nilai du sebesar 1,3912 dan nilai dl sebesar 1,6677.

Untuk melihat apakah ada autokorelasi dapat melihat grafik dibawah ini:

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif
0	<b>1,3912</b> (du)	<b>1,6677</b> (dl)	<b>2,6088</b> (4-du)	<b>2,3323</b> (4-dl)
				4

**Gambar 8. Grafik uji Durbi-Watson**

Berdasarkan grafik tersebut, nilai D-W sebesar 1,639321 berada di antara du dan dl jadi nilai D-W tersebut masuk kategori ragu-ragu. Sedangkan probalilitasnya sebesar 0,0014 dimana kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan terdapat data tidak terbebas dari autokorelasi atau diduga terdapat autokorelasi. Untuk memperbaiki data agar terbebas dari autokorelasi dilakukan koreksi autokorelasi menggunakan metode *Cochrane Orcutt*. Berikut hasil uji autokorelasi setelah dilakukannya koreksi autokorelasi:

Tabel 15. Hasil uji autokorelasi setelah koreksi autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.654399	Prob. F(2,38)	0.0827
Obs*R-squared	5.389785	Prob. Chi-Square(2)	0.0675
Durbin-Watson stat	1.979672		

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan grafik 8, nilai D-W sebesar 1.979672 berada di antara dl dan 4-du jadi nilai D-W tersebut masuk kategori tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan probalilitasnya sebesar 0,0827 lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan terdapat data terbebas dari autokorelasi.

## 5. Uji Statistik

### a. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji simultan dilakukan dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Apabila probabilitas *F-statistic*  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dari hasil regresi dengan metode OLS dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai probabilitas *F-statistic* adalah sebesar 0.0000. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang EDU, HEA dan AGR secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap GDP. Begitu pula dengan hasil regresi dengan metode ECM ditemukan bahwa probabilitas *F-statistic* adalah sebesar 0.000000. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek, variabel EDU, HEA dan AGR secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap GDP. Jadi, berdasarkan hasil temuan analisis dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki berpengaruh.

### b. Uji Parsial (uji t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial dilakukan dengan menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 10%. Apabila probabilitas *t-statistic*  $< 0,1$  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.



**1) Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dalam jangka panjang memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6.083198 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Sedangkan dalam jangka pendek memiliki  $t_{hitung}$  8.133566 dengan probabilitas 0.0000 . Dalam taraf signifikan 10% maka variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**2) Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam jangka panjang memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 2.543014 dengan probabilitas sebesar 0.0152. Sedangkan dalam jangka pendek memiliki  $t_{hitung}$  2.081267 dengan probabilitas 0.0241. Dalam taraf signifikan 10% maka variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang maupun jangka pendek.

**3) Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dalam jangka panjang memiliki  $t_{hitung}$

sebesar 0.344659 dengan probabilitas sebesar 0.0497. Sedangkan dalam jangka pendek memiliki  $t_{hitung}$  0.483654 dengan probabilitas 0.0473. Dalam taraf signifikan 10% maka variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang maupun jangka pendek.

**c. Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* dalam jangka panjang diperoleh angka sebesar 0,939029. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 94,%. Sisanya sebesar 0,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sedangkan dalam jangka pendek diperoleh angka sebesar 0,955497. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 96%. Sisanya sebesar 0,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Analisis data *times series* pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1970-2015. Dari hasil pengolahan data *times series* dilakukan dengan analisis regresi metode *Ordinary Least Squares* (OLS) pada jangka panjang dan *Error Correction Model* (ECM) pada jangka pendek. Hasil regresi dengan metode OLS sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Estimasi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.462983	0.620844	5.577859	0.0000
BARU_EDU	1.197529	0.196858	6.083198	0.0000
BARU_HEA	0.370760	0.145796	2.543014	0.0152
BARU_AGR	0.066870	0.194018	0.344659	0.0497

Sumber: lampiran 5

$$GDP_t = 3.462983 + 1.197529EDU_t + 0.370760HEA_t + 0.066870AGR_t + \mu$$

(5.577859)                      (6.083198)                      (2.543014)                      (0.344659)

Berdasarkan tabel 16 dan persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai koefisien konstanta pada jangka panjang sebesar 3.462983. Koefisien dari variabel-variabel tersebut secara akumulasi berpengaruh secara positif. Analisis regresi selanjutnya dilakukan dengan metode ECM. Penggunaan metode ini dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari adanya regresi palsu yang sering terjadi pada data *time series*. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian juga ditemukan bahwa data variabel bersifat *nonstationer* dan saling berkointegrasi sehingga mendukung penggunaan metode ECM. Bentuk persamaan hasil analisis regresi dengan metode ECM ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Estimasi ECM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.381927	0.400770	9.529901	0.0005
D(BARU_EDU)	1.589343	0.195405	8.133566	0.0000
D(BARU_HEA)	0.324361	0.155848	2.081267	0.0241
D(BARU_AGR)	0.093974	0.194301	0.483654	0.0473
U(-1)	-0.784920	0.173399	-4.526664	0.0001

Sumber: lampiran 6

$$\begin{aligned} \text{Ln\_GDP} = & 0.381927 + 1.589343\text{Ln\_EDU} + 0.324361\text{Ln\_HEA} \\ & (9.529901) \quad (8.133566) \quad (2.081267) \\ & + 0.093974 \text{Ln\_AGR} - 0.784920 \text{Resid}(-1) \\ & (0.483654) \quad (-4.526664) \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 17 dan persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien konstanta pada jangka pendek sebesar 0.381927. Koefisien dari variabel-variabel tersebut secara akumulasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, analisis regresi dengan ECM menghasilkan nilai Res(-1) atau

ECT sebesar -0.989110. Nilai ECT yang bertanda negatif menunjukkan adanya penyesuaian terhadap ketidakstabilan yang terjadi dalam jangka pendek. Dengan kata lain telah terjadi penyesuaian keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang antara variabel EDU, HEA dan AGR terhadap GDP. Nilai koefisien -0.784920 menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi ekuilibrium selama 1 tahun 7 bulan.

Selanjutnya, merujuk pada hipotesis yang telah diajukan peneliti pada bab sebelumnya, pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Berikut penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **1. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah sebesar 1.197529. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 1,19 %. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang memberikan arti bahwa pengambilan kebijakan anggaran pendidikan minimal 20% yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak dalam jangka panjang. Artinya adalah apabila pemerintah terus mengoptimalkan pengeluaran pemerintah di sektor

pendidikan, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan PDB Indonesia. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 1.589343 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,58%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam jangka panjang maupun pendek, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ri Setia Utama (2013), baik secara jangka panjang maupun jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Sejalan pula dengan beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya diantaranya teori pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut menyarankan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung (Todaro dan Smith, 2012: 151). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia. Bahkan beberapa ekonom terdahulu menekankan pentingnya modal manusia ke dalam produksi. Pengetahuan dan ketrampilan teknologi merupakan peralatan immaterial dimana tanpa keduanya modal fisik manusia tidak dimanfaatkan secara produktif. Semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan modal manusia yang nantinya akan meningkatkan produktifitas

sehingga PDB Indonesia juga meningkat. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap PDB jika dibandingkan dua sektor lainnya yaitu adanya amanat dari UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang menetapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN Indonesia.

## **2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam jangka panjang maupun pendek signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah sebesar 0.370760. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 0,37 %. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang memberikan arti bahwa pengambilan kebijakan anggaran kesehatan minimal 5% yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak dalam jangka panjang. Artinya adalah apabila pemerintah terus mengoptimalkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto Indonesia. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 0.324361 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang maupun pendek pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ri Setia Utama (2013), secara jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Sejalan pula dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyarankan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung (Todaro dan Smith, 2012: 151). Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia. Dalam sektor kesehatan, teori ini berlaku pada jangka panjang maupun jangka pendek bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mempengaruhi produk domestik bruto. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian serta kegiatan keluarga berencana. Semakin baik pemerintah mengoptimalkan anggaran kesehatan tersebut, semakin baik tingkat kesehatan masyarakatnya secara nasionalnya. Dan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, hal ini dapat dicapai dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, semakin baik fisik mereka dalam berproduktif. Makadari itu pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penyebab pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB yaitu adanya kesepakatan pemerintah dalam UU no.

9 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN Indonesia.

### **3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dalam jangka panjang maupun jangka pendek signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah atas pertanian adalah sebesar 0.066870. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 1% akan meningkatkan PDB sebesar 0,06 %. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang memberikan arti bahwa pengambilan kebijakan anggaran pertanian yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Apabila pemerintah terus meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan meningkatkan produk domestik bruto Indonesia. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 0.093974 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pertanian meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang maupun pendek pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengeluaran



pemerintah di sektor pertanian akan memicu kenaikan output yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia. Meskipun berpengaruh positif tetapi kontribusinya termasuk sedikit sejalan dengan semakin menurunnya persentase kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB total Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Dari tahun 2010 sekitar 13,17 % menjadi sekitar 12,06% di tahun 2014.

Model ECM tentu tidak terlepas dari adanya ECT (*Error Correction Term*), koefisien ECT sebesar -0.784920 menunjukkan bahwa *disequilibrium* periode sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang sebesar 78,49 %. ECT menunjukkan seberapa cepat *equilibrium* tercapai kembali ke dalam keseimbangan jangka panjang. yang menunjukkan penyesuaian jangka panjang dan jangka pendek untuk kembali pada posisi *equilibrium* memiliki tingkat kecepatan yang lambat (*slow convergence*) karena koefisien bernilai negatif. Nilai koefisien -0.784920 menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi ekuilibrium selama 1 tahun 7 bulan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Pada jangka panjang, nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1.197529. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan PDB sebesar 1,19 %. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 1.589343 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,58%.
2. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendek signifikan dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Pada jangka panjang, nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 0.370760. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan meningkat sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan PDB sebesar 0,37 %. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 0.324361 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap

PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan meningkat sebesar 1%, akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32%.

3. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Pada jangka panjang, nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah di sektor pertanian adalah sebesar 0.066870. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 1% akan meningkatkan PDB sebesar 0,06 %. Dilihat dalam jangka pendek, nilai koefisien regresi sebesar 0.093974 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah di sektor pertanian meningkat sebesar 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%.
4. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek. ECT menunjukkan tingkat kecepatan penyesuaian jangka pendek menuju equilibrium jangka panjang. Dalam hasil estimasi ini menunjukkan nilai ECT negatif yang artinya tingkat kecepatan penyesuaian lambat (slow convergence) untuk kembali ke kondisi equilibrium. Besaran koreksi kesalahan sebesar 0,784920 mengindikasikan penyesuaian kepada kondisi equilibrium PDB adalah sebesar 1 tahun 7 bulan.

## B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Data *times series* yang kurang banyak, hanya 46 tahun. Karena keterbatasan dalam ketersediaan data untuk beberapa variabel.
2. Besarnya pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan data Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang belum memasukkan inflasi di dalamnya.
3. Pada hakikatnya penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas saja berupa pengeluaran pemerintah walaupun dijabarkan lagi ke dalam beberapa sektor.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada banyak sekali. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya 3 variabel saja yang dianalisis.

## C. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia:
  - a. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun pendek, sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan yang sebesar 20% APBN tersebut.
  - b. Pada jangka panjang maupun pendek pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya pemerintah perlu meningkatkan anggaran kesehatan lebih dari ketentuan 5% APBN.

c. Pada jangka panjang dan pendek pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun berpengaruh positif, tetapi pengaruhnya cukup kecil. Sektor ini perlu diperhatikan karena terjadi masalah dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini paling banyak di bandingkan sektor lain, tetapi kontribusi yang diberikan kepada PDB total termasuk sedikit.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya :

a. Menambah periode waktu penelitian

Penambahan periode waktu penelitian dimungkinkan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam rangka pengambilan keputusan.

b. Memasukkan unsur inflasi

Dengan memasukkan unsur inflasi ke dalam pengeluaran pemerintah akan lebih mendapatkan hasil yang sesuai dengan kenyataan.

c. Menambah variabel bebas

Penambahan variabel bebas lainnya dimungkinkan akan mendapatkan hasil yang lebih mencerminkan faktor yang mempengaruhi variabel terikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M.D. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan. Tahun 1970-2015. *Nota Keuangan dan APBN Indonesia* . [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) . Diakses pada 10 November 2016.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan. 2014. Anggaran pendidikan 20%, apakah sudah dialokasikan?. *Artikel*. Kementrian Keuangan. [www.bppk.kemenkeu.com](http://www.bppk.kemenkeu.com) Diakses pada 7 Februari 2017.
- Badan Pusat statistik. 2015. *Nilai Kurs valuta asing Indonesia terhadap Dollar USA*. Yogyakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) . Diakses pada 15 februari 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha tahun 2010-2014*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) . Diakses pada 15 Maret 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Konsep pendapatan Nasional*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) . Diakses pada 1 Januari 2017.
- Bancin, M.S. 2009. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Bastias, Desi Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Gujarati, dkk. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Data Worldbank. Tahun 1962- 2015. *Data GDP Indonesia*. [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org) . Diakses pada 9 November 2016.
- Hutama, Ri Setia. 2015. Analisis Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Tesis*. Universitas Gajah Mada.

- Hakim, Arif Rahman. 2015. Stasioneritas, Akar Unit, & Kointegrasi (Pengantar Ekonometrika *Time Series*). *Artikel*. FE Universitas Indonesia.
- Junaidi. 2016. Tabel Durbin-Watson,  $\alpha = 5\%$ . *Modul*. Laboratorium Komputasi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersedia online : [www.lkeb.umm.ac.id](http://www.lkeb.umm.ac.id) Diakses pada 8 Mei 2017.
- Ilyas, Marzuki. 1989. *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Maruddani, Di Asih I. 2014. *Modul Praktikum Ekonometrika*. Semarang: UNDIP.
- Purwanto, D. A. 2006. Disorientasi Anggaran dalam Pembangunan Nasional. *Artikel*. [www.ekofeum.or.id](http://www.ekofeum.or.id) Diakses pada 10 Februari 2017.
- Rahayu, Sri Endang. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Vol 11 No 2 Oktober 2011*. UMSU.
- Safari, Menik Fitriani. 2016. Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samuelson, Paul A., William D Nordhaus. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga
- Soediyono. 1989. *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suparmoko. 2012. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- Soetrisno. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development-eleventh Edition*. United States of America: Pearson.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang- Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UNDP (*United Nations Development Programme*). 2015. Human Development Report 2015. [www.undp.org](http://www.undp.org) Diakses pada 10 Februari 2017.

Widodo, Dkk. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1 Juli 2011*. Universitas Diponegoro.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### DATA MENTAH (dalam rupiah)

No	Tahun	EDU	HEA	AGR	GDP
1	1970	22.460.637.200	7.793.596.000	27.064.065.200	3.650.247.725.282
2	1971	27.173.944.300	8.928.399.300	27.504.401.900	4.087.383.950.368
3	1972	32.730.144.200	11.103.545.400	47.067.856.000	4.816.110.092.300
4	1973	43.992.458.900	13.300.007.100	41.464.850.500	7.126.040.182.800
5	1974	71.345.620.000	15.204.513.000	70.255.612.000	11.299.500.064.800
6	1975	134.809.647.700	25.994.105.000	102.033.947.500	13.341.400.498.200
7	1976	212.491.626.400	52.275.649.600	292.541.863.400	16.321.400.012.800
8	1977	249.512.622.800	60.701.154.600	283.713.526.700	20.084.399.538.200
9	1978	337.201.062.700	79.172.229.700	242.072.563.500	34.425.032.387.305
10	1979	422.002.305.400	90.059.338.600	321.040.814.800	34.837.496.051.367
11	1980	498.564.451.900	130.460.949.100	281.209.786.300	49.460.372.627.771
12	1981	808.087.404.700	209.221.108.000	534.467.171.100	59.460.704.088.803
13	1982	1.147.785.670.000	287.340.049.000	739.773.200.000	65.542.893.359.509
14	1983	1.653.329.886.000	353.235.184.000	921.558.868.000	84.867.230.972.079
15	1984	1.713.232.488.000	360.699.847.000	988.672.590.000	94.259.594.959.161
16	1985	1.749.307.172.000	503.073.691.000	915.792.446.000	98.278.068.339.957
17	1986	1.938.471.295.000	419.614.269.000	1.008.810.646.000	131.379.539.141.163
18	1987	1.763.443.266.000	364.910.222.000	957.342.726.000	125.283.869.229.798
19	1988	1.264.168.230.000	311.679.438.000	698.306.428.000	153.513.800.702.442
20	1989	1.401.246.828.000	357.762.383.000	402.870.099.000	182.160.778.520.373
21	1990	1.611.151.691.000	464.754.806.000	415.057.681.000	217.524.772.783.561
22	1991	2.518.987.083.000	740.691.828.000	746.687.799.000	255.310.655.694.103
23	1992	3.188.140.769.000	974.273.117.000	1.014.694.768.000	286.857.748.847.513
24	1993	3.832.712.568.000	1.223.078.860.000	1.209.014.519.000	333.394.453.243.871
25	1994	4.432.831.044.000	1.412.663.947.000	1.365.742.911.000	389.162.726.135.657
26	1995	3.579.124.129.000	1.119.608.780.000	1.015.017.768.000	466.520.731.803.508
27	1996	6.216.590.228.000	1.410.129.877.000	1.078.745.309.000	541.821.926.825.050
28	1997	6.423.826.931.000	1.600.976.082.000	1.177.030.885.000	1.003.232.174.108.100
29	1998	8.869.815.391.000	2.679.984.507.000	2.091.943.522.000	765.950.522.838.916
30	1999	8.081.655.958.000	2.157.387.102.000	2.357.009.891.000	994.009.602.943.750

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>EDU</b>	<b>HEA</b>	<b>AGR</b>	<b>GDP</b>
31	2000	9.082.378.321.000	1.571.087.878.000	1.650.794.892.000	1.583.376.612.648.240
32	2001	13.611.800.000.000	4.563.000.000.000	3.253.000.000.000	1.668.648.255.437.650
33	2002	15.204.275.111.000	5.200.680.444.000	3.867.582.000.000	1.749.205.862.642.610
34	2003	18.193.938.445.000	6.105.728.882.000	4.594.377.219.000	1.987.348.863.895.190
35	2004	20.051.065.218.000	6.557.709.901.000	4.867.118.020.000	2.386.014.645.897.970
36	2005	25.987.390.636.000	7.038.102.327.000	6.345.639.246.000	2.810.088.526.793.070
37	2006	43.287.400.000.000	12.730.300.000.000	8.345.700.000.000	3.288.426.050.996.060
38	2007	54.067.138.400.000	17.467.051.200.000	7.570.300.000.000	4.071.049.453.101.410
39	2008	64.029.169.200.000	17.270.310.000.000	11.241.800.000.000	5.587.003.553.165.230
40	2009	89.900.000.000.000	17.300.000.000.000	8.716.800.000.000	5.072.052.804.756.570
41	2010	84.086.500.000.000	18.001.800.000.000	9.004.700.000.000	6.789.051.570.932.390
42	2011	91.483.000.000.000	17.649.400.000.000	13.219.900.000.000	8.097.443.839.874.180
43	2012	103.666.700.000.000	16.564.500.000.000	18.717.500.000.000	8.875.802.062.238.740
44	2013	118.467.100.000.000	17.284.000.000.000	19.925.500.000.000	11.122.756.702.455.900
45	2014	131.313.600.000.000	18.077.700.000.000	16.527.100.000.000	11.077.659.207.973.800
46	2015	146.392.800.000.000	21.113.200.000.000	15.879.300.000.000	11.890.379.098.772.900

Sumber: *Worldbank* dan Kementerian Keuangan (diolah)

## LAMPIRAN 2

### PDB

<b>Tahun</b>	<b>PDB dollar</b>	<b>kurs (akhir tahun)</b>	<b>PDB Rupiah</b>
1970	\$ 9.656.740.013,97	378,00	Rp 3.650.247.725.282
1971	\$ 9.849.117.952,69	415,00	Rp 4.087.383.950.368
1972	\$ 11.605.084.559,76	415,00	Rp 4.816.110.092.300
1973	\$ 17.171.181.163,37	415,00	Rp 7.126.040.182.800
1974	\$ 27.227.710.999,52	415,00	Rp 11.299.500.064.800
1975	\$ 32.147.953.007,71	415,00	Rp 13.341.400.498.200
1976	\$ 39.328.674.729,64	415,00	Rp 16.321.400.012.800
1977	\$ 48.396.143.465,54	415,00	Rp 20.084.399.538.200
1978	\$ 54.298.158.339,60	634,00	Rp 34.425.032.387.305
1979	\$ 55.122.620.334,44	632,00	Rp 34.837.496.051.367
1980	\$ 78.013.206.037,49	634,00	Rp 49.460.372.627.771
1981	\$ 92.473.878.831,73	643,00	Rp 59.460.704.088.803
1982	\$ 94.715.163.814,32	692,00	Rp 65.542.893.359.509
1983	\$ 85.369.201.879,13	994,12	Rp 84.867.230.972.079
1984	\$ 87.612.439.197,26	1075,87	Rp 94.259.594.959.161
1985	\$ 87.338.874.330,11	1125,25	Rp 98.278.068.339.957
1986	\$ 80.060.657.611,92	1641,00	Rp 131.379.539.141.163
1987	\$ 75.929.617.715,03	1650,00	Rp 125.283.869.229.798
1988	\$ 88.787.623.309,68	1729,00	Rp 153.513.800.702.442
1989	\$ 101.455.197.785,76	1795,48	Rp 182.160.778.520.373
1990	\$ 114.426.498.045,01	1901,00	Rp 217.524.772.783.561
1991	\$ 128.167.999.846,44	1992,00	Rp 255.310.655.694.103
1992	\$ 139.116.270.052,14	2062,00	Rp 286.857.748.847.513
1993	\$ 158.006.849.878,61	2110,00	Rp 333.394.453.243.871
1994	\$ 176.892.148.243,48	2200,00	Rp 389.162.726.135.657
1995	\$ 202.132.032.843,81	2308,00	Rp 466.520.731.803.508
1996	\$ 227.369.671.349,16	2383,00	Rp 541.821.926.825.050
1997	\$ 215.748.854.646,90	4650,00	Rp 1.003.232.174.108.100
1998	\$ 95.445.548.017,31	8025,00	Rp 765.950.522.838.916
1999	\$ 140.001.352.527,29	7100,00	Rp 994.009.602.943.750
2000	\$ 165.021.012.261,41	9595,00	Rp 1.583.376.612.648.240
2001	\$ 160.446.947.638,24	10400,00	Rp 1.668.648.255.437.650
2002	\$ 195.660.611.033,85	8940,00	Rp 1.749.205.862.642.610
2003	\$ 234.772.458.818,10	8465,00	Rp 1.987.348.863.895.190
2004	\$ 256.836.883.304,41	9290,00	Rp 2.386.014.645.897.970
2005	\$ 285.868.619.205,81	9830,00	Rp 2.810.088.526.793.070
2006	\$ 364.570.515.631,49	9020,00	Rp 3.288.426.050.996.060
2007	\$ 432.216.737.774,86	9419,00	Rp 4.071.049.453.101.410
2008	\$ 510.228.634.992,26	10950,00	Rp 5.587.003.553.165.230

<b>Tahun</b>	<b>PDB dollar</b>	<b>kurs (akhir tahun)</b>	<b>PDB Rupiah</b>
2009	\$ 539.580.085.612,40	9400,00	Rp 5.072.052.804.756.570
2010	\$ 755.094.157.594,53	8991,00	Rp 6.789.051.570.932.390
2011	\$ 892.969.104.529,57	9068,00	Rp 8.097.443.839.874.180
2012	\$ 917.869.913.364,92	9670,00	Rp 8.875.802.062.238.740
2013	\$ 912.524.136.718,02	12189,00	Rp 11.122.756.702.455.900
2014	\$ 890.487.074.595,97	12440,00	Rp 11.077.659.207.973.800
2015	\$ 861.933.968.740,33	13795,00	Rp 11.890.379.098.772.900

### LAMPIRAN 3

#### DATA PENELITIAN (dalam miliar rupiah)

No	Tahun	EDU	HEA	AGR	GDP
1	1970	22,46	7,79	27,06	3.650,25
2	1971	27,17	8,93	27,50	4.087,38
3	1972	32,73	11,10	47,07	4.816,11
4	1973	43,99	13,30	41,46	7.126,04
5	1974	71,35	15,20	70,26	11.299,50
6	1975	134,81	25,99	102,03	13.341,40
7	1976	212,49	52,28	292,54	16.321,40
8	1977	249,51	60,70	283,71	20.084,40
9	1978	337,20	79,17	242,07	34.425,03
10	1979	422,00	90,06	321,04	34.837,50
11	1980	498,56	130,46	281,21	49.460,37
12	1981	808,09	209,22	534,47	59.460,70
13	1982	1.147,79	287,34	739,77	65.542,89
14	1983	1.653,33	353,24	921,56	84.867,23
15	1984	1.713,23	360,70	988,67	94.259,59
16	1985	1.749,31	503,07	915,79	98.278,07
17	1986	1.938,47	419,61	1.008,81	131.379,54
18	1987	1.763,44	364,91	957,34	125.283,87
19	1988	1.264,17	311,68	698,31	153.513,80
20	1989	1.401,25	357,76	402,87	182.160,78
21	1990	1.611,15	464,75	415,06	217.524,77
22	1991	2.518,99	740,69	746,69	255.310,66
23	1992	3.188,14	974,27	1.014,69	286.857,75
24	1993	3.832,71	1.223,08	1.209,01	333.394,45
25	1994	4.432,83	1.412,66	1.365,74	389.162,73
26	1995	3.579,12	1.119,61	1.015,02	466.520,73
27	1996	6.216,59	1.410,13	1.078,75	541.821,93
28	1997	6.423,83	1.600,98	1.177,03	1.003.232,17
29	1998	8.869,82	2.679,98	2.091,94	765.950,52
30	1999	8.081,66	2.157,39	2.357,01	994.009,60
31	2000	9.082,38	1.571,09	1.650,79	1.583.376,61
32	2001	13.611,80	4.563,00	3.253,00	1.668.648,26
33	2002	15.204,28	5.200,68	3.867,58	1.749.205,86
34	2003	18.193,94	6.105,73	4.594,38	1.987.348,86
35	2004	20.051,07	6.557,71	4.867,12	2.386.014,65
36	2005	25.987,39	7.038,10	6.345,64	2.810.088,53

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>EDU</b>	<b>HEA</b>	<b>AGR</b>	<b>GDP</b>
37	2006	43.287,40	12.730,30	8.345,70	3.288.426,05
38	2007	54.067,14	17.467,05	7.570,30	4.071.049,45
39	2008	64.029,17	17.270,31	11.241,80	5.587.003,55
40	2009	89.900,00	17.300,00	8.716,80	5.072.052,80
41	2010	84.086,50	18.001,80	9.004,70	6.789.051,57
42	2011	91.483,00	17.649,40	13.219,90	8.097.443,84
43	2012	103.666,70	16.564,50	18.717,50	8.875.802,06
44	2013	118.467,10	17.284,00	19.925,50	11.122.756,70
45	2014	131.313,60	18.077,70	16.527,10	11.077.659,21
46	2015	146.392,80	21.113,20	15.879,30	11.890.379,10

**LAMPIRAN 4**  
**HASIL UJI DESKRIPTIF**

	GDP	EDU	HEA	AGR
Mean	2054441.	23762.40	4824.797	3806.557
Median	310126.1	3383.632	1046.941	1014.856
Maximum	11890379	146392.8	21113.20	19925.50
Minimum	3650.248	22.46064	7.793596	27.06407
Std. Dev.	3326642.	40033.09	6959.181	5435.974
Skewness	1.806361	1.768023	1.234000	1.679181
Kurtosis	5.081030	4.822217	2.812147	4.696659
Jarque-Bera	33.31636	30.32952	11.74211	27.13472
Probability	0.000000	0.000000	0.002820	0.000001
Sum	94504288	1093070.	221940.6	175101.6
Sum Sq. Dev.	4.98E+14	7.21E+10	2.18E+09	1.33E+09
Observations	46	46	46	46



## LAMPIRAN 5

### UJI STATIONER AUGMENTED DICKEY-FULLER

#### A. Uji Stationer pada tingkat level

##### 1. Produk Domestik Bruto

Null Hypothesis: LN\_GDP has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Lothman-Stock DF-GLS test statistic	0.414354
Test critical values:	
1% level	-2.622585
5% level	-1.949097
10% level	-1.611824

\*MacKinnon (1996)  
 DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals  
 Dependent Variable: D(GLSRESID)  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/05/17 Time: 09:10  
 Sample (adjusted): 6 46  
 Included observations: 41 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	0.004171	0.010065	0.414354	0.6811
D(GLSRESID(-1))	-0.300724	0.143463	-2.096184	0.0432
D(GLSRESID(-2))	0.180609	0.119637	1.509643	0.1399
D(GLSRESID(-3))	0.538783	0.120432	4.473741	0.0001
D(GLSRESID(-4))	0.360695	0.141058	2.557071	0.0149
R-squared	0.166856	Mean dependent var		0.073711
Adjusted R-squared	0.074285	S.D. dependent var		0.067797
S.E. of regression	0.065230	Akaike info criterion		-2.507933
Sum squared resid	0.153180	Schwarz criterion		-2.298961
Log likelihood	56.41263	Hannan-Quinn criter.		-2.431837
Durbin-Watson stat	2.345278			

## 2. Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan

Null Hypothesis: LN\_EDU has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	1.681264
Test critical values:	
1% level	-2.617364
5% level	-1.948313
10% level	-1.612229

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals

Dependent Variable: D(GLSRESID)

Method: Least Squares

Date: 05/05/17 Time: 09:17

Sample (adjusted): 2 46

Included observations: 45 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	0.022876	0.013607	1.681264	0.0998
R-squared	-0.870241	Mean dependent var		0.084758
Adjusted R-squared	-0.870241	S.D. dependent var		0.086130
S.E. of regression	0.117789	Akaike info criterion		-1.417870
Sum squared resid	0.610468	Schwarz criterion		-1.377722
Log likelihood	32.90208	Hannan-Quinn criter.		-1.402904
Durbin-Watson stat	0.867970			

### 3. Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan

Null Hypothesis: LN\_HEA has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	0.980904
Test critical values:	
1% level	-2.617364
5% level	-1.948313
10% level	-1.612229

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals

Dependent Variable: D(GLSRESID)

Method: Least Squares

Date: 05/05/17 Time: 09:34

Sample (adjusted): 2 46

Included observations: 45 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	0.015861	0.016169	0.980904	0.3320
R-squared	-0.436184	Mean dependent var		0.076285
Adjusted R-squared	-0.436184	S.D. dependent var		0.112820
S.E. of regression	0.135204	Akaike info criterion		-1.142089
Sum squared resid	0.804328	Schwarz criterion		-1.101941
Log likelihood	26.69700	Hannan-Quinn criter.		-1.127122
Durbin-Watson stat	1.328058			

#### 4. Pengeluaran Pemerintah atas Pertanian

Null Hypothesis: LN\_AGR has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	0.519690
Test critical values:	
1% level	-2.617364
5% level	-1.948313
10% level	-1.612229

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals

Dependent Variable: D(GLSRESID)

Method: Least Squares

Date: 05/05/17 Time: 09:39

Sample (adjusted): 2 46

Included observations: 45 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	0.012090	0.023264	0.519690	0.6059
R-squared	-0.202188	Mean dependent var		0.061521
Adjusted R-squared	-0.202188	S.D. dependent var		0.135907
S.E. of regression	0.149014	Akaike info criterion		-0.947581
Sum squared resid	0.977028	Schwarz criterion		-0.907433
Log likelihood	22.32057	Hannan-Quinn criter.		-0.932614
Durbin-Watson stat	1.640443			

## B. Uji Stationer pada tingkat *first different*

### 1. Produk Domestik Bruto

Null Hypothesis: D(LN\_GDP) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rootenber-Stock DF-GLS test statistic	-5.383279
Test critical values:	
1% level	-2.619851
5% level	-1.948686
10% level	-1.612036

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals  
 Dependent Variable: D(GLSRESID)  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/05/17 Time: 09:15  
 Sample (adjusted): 4 46  
 Included observations: 43 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	-1.354117	0.251541	-5.383279	0.0000
D(GLSRESID(-1))	0.071668	0.158215	0.452981	0.6530
R-squared	0.632119	Mean dependent var		-0.000942
Adjusted R-squared	0.623146	S.D. dependent var		0.114488
S.E. of regression	0.070283	Akaike info criterion		-2.427189
Sum squared resid	0.202526	Schwarz criterion		-2.345273
Log likelihood	54.18456	Hannan-Quinn criter.		-2.396981
Durbin-Watson stat	1.897496			

## 2. Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan

Null Hypothesis: D(LN\_EDU) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	-5.303867
Test critical values:	
1% level	-2.618579
5% level	-1.948495
10% level	-1.612135

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals  
 Dependent Variable: D(GLSRESID)  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/05/17 Time: 09:33  
 Sample (adjusted): 3 46  
 Included observations: 44 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	-0.792766	0.149469	-5.303867	0.0000
R-squared	0.395448	Mean dependent var		-0.000807
Adjusted R-squared	0.395448	S.D. dependent var		0.109709
S.E. of regression	0.085302	Akaike info criterion		-2.062766
Sum squared resid	0.312889	Schwarz criterion		-2.022216
Log likelihood	46.38085	Hannan-Quinn criter.		-2.047728
Durbin-Watson stat	2.066172			

### 3. Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan

Null Hypothesis: D(LN\_HEA) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	-6.140614
Test critical values:	
1% level	-2.618579
5% level	-1.948495
10% level	-1.612135

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals  
 Dependent Variable: D(GLSRESID)  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/05/17 Time: 09:36  
 Sample (adjusted): 3 46  
 Included observations: 44 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	-0.934338	0.152157	-6.140614	0.0000
R-squared	0.467209	Mean dependent var		0.000190
Adjusted R-squared	0.467209	S.D. dependent var		0.156363
S.E. of regression	0.114134	Akaike info criterion		-1.480428
Sum squared resid	0.560139	Schwarz criterion		-1.439879
Log likelihood	33.56942	Hannan-Quinn criter.		-1.465390
Durbin-Watson stat	1.983855			

#### 4. Pengeluaran Pemerintah atas Pertanian

Null Hypothesis: D(LN\_AGR) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	-6.151757
Test critical values: 1% level	-2.618579
5% level	-1.948495
10% level	-1.612135

\*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals  
 Dependent Variable: D(GLSRESID)  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/05/17 Time: 09:40  
 Sample (adjusted): 3 46  
 Included observations: 44 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	-0.937361	0.152373	-6.151757	0.0000
R-squared	0.468108	Mean dependent var		-0.000554
Adjusted R-squared	0.468108	S.D. dependent var		0.191898
S.E. of regression	0.139953	Akaike info criterion		-1.072560
Sum squared resid	0.842230	Schwarz criterion		-1.032010
Log likelihood	24.59631	Hannan-Quinn criter.		-1.057522
Durbin-Watson stat	1.936118			



## LAMPIRAN 6

### UJI KOINTEGRASI

Date: 05/08/17 Time: 11:01  
 Sample (adjusted): 3 46  
 Included observations: 44 after adjustments  
 Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: GDP EDU HEA AGR  
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

#### Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.789188	129.9837	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.613509	61.48501	29.79707	0.0000
At most 2 *	0.350275	19.65658	15.49471	0.0111
At most 3	0.015415	0.683546	3.841466	0.4084

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

#### Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.789188	68.49873	27.58434	0.0000
At most 1 *	0.613509	41.82843	21.13162	0.0000
At most 2 *	0.350275	18.97303	14.26460	0.0084
At most 3	0.015415	0.683546	3.841466	0.4084

Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## LAMPIRAN 7

### HASIL UJI OLS

Dependent Variable: LN\_GDP  
 Method: Least Squares  
 Date: 06/03/17 Time: 10:27  
 Sample: 1 46  
 Included observations: 46

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.897150	1.166634	8.483512	0.0000
LN_EDU	1.173373	0.208641	5.623890	0.0000
LN_HEA	0.199031	0.170702	1.165954	0.0502
LN_AGR	-0.568344	0.151087	-3.761703	0.0005
R-squared	0.988612	Mean dependent var		33.39497
Adjusted R-squared	0.987799	S.D. dependent var		2.384365
S.E. of regression	0.263377	Akaike info criterion		0.252480
Sum squared resid	2.913432	Schwarz criterion		0.411493
Log likelihood	-1.807050	Hannan-Quinn criter.		0.312047
F-statistic	1215.366	Durbin-Watson stat		1.060252
Prob(F-statistic)	0.000000			

### HASIL UJI OLS SETELAH KOREKSI AUTOKORELASI DENGAN METODE COCHRANE ORCUTT

Dependent Variable: BARU\_GDP  
 Method: Least Squares  
 Date: 07/20/17 Time: 14:13  
 Sample (adjusted): 3 46  
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.462983	0.620844	5.577859	0.0000
BARU_EDU	1.197529	0.196858	6.083198	0.0000
BARU_HEA	0.370760	0.145796	2.543014	0.0152
BARU_AGR	0.066870	0.194018	0.344659	0.0497
R-squared	0.939029	Mean dependent var		13.32889
Adjusted R-squared	0.931007	S.D. dependent var		0.852605
S.E. of regression	0.223950	Akaike info criterion		-0.028662
Sum squared resid	1.905841	Schwarz criterion		0.214636
Log likelihood	6.630566	Hannan-Quinn criter.		0.061565
F-statistic	117.0497	Durbin-Watson stat		1.804317
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN 8

### HASIL UJI ECM

Dependent Variable: D(LN\_GDP)  
Method: Least Squares  
Date: 06/03/17 Time: 10:43  
Sample (adjusted): 2 46  
Included observations: 45 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.163581	0.034888	4.688734	0.0000
D(LN_EDU)	0.289616	0.182627	1.585838	0.1207
D(LN_HEA)	0.146136	0.133748	1.092617	0.2811
D(LN_AGR)	-0.104046	0.100324	-1.037104	0.3059
U(-1)	-0.172662	0.104298	-1.655474	0.1057
R-squared	0.122974	Mean dependent var		0.179749
Adjusted R-squared	0.035272	S.D. dependent var		0.158664
S.E. of regression	0.155841	Akaike info criterion		-0.775526
Sum squared resid	0.971453	Schwarz criterion		-0.574785
Log likelihood	22.44933	Hannan-Quinn criter.		-0.700692
F-statistic	1.402175	Durbin-Watson stat		2.467890
Prob(F-statistic)	0.250760			

### HASIL UJI ECM SETELAH KOREKSI AUTOKORELASI DENGAN METODE COCHRANE ORCUTT

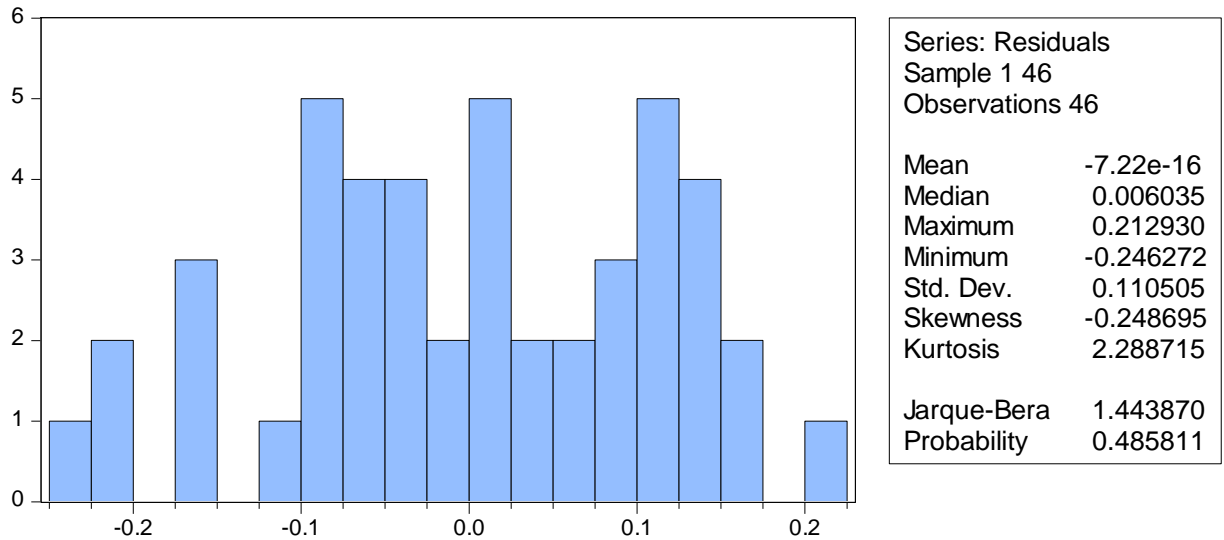
Dependent Variable: D(BARU\_GDP)  
Method: Least Squares  
Date: 07/20/17 Time: 14:14  
Sample (adjusted): 3 46  
Included observations: 45 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.381927	0.400770	9.529901	0.0005
D(BARU_EDU)	1.589343	0.195405	8.133566	0.0000
D(BARU_HEA)	0.324361	0.155848	2.081267	0.0241
D(BARU_AGR)	0.093974	0.194301	0.483654	0.0473
U(-1)	-0.784920	0.173399	-4.526664	0.0001
R-squared	0.955497	Mean dependent var		-0.105234
Adjusted R-squared	0.949641	S.D. dependent var		1.171953
S.E. of regression	0.262995	Akaike info criterion		0.292758
Sum squared resid	2.628317	Schwarz criterion		0.536057
Log likelihood	-0.440686	Hannan-Quinn criter.		0.382985
F-statistic	163.1751	Durbin-Watson stat		2.095135
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN 9

### UJI ASUMSI KLASIK

#### A. Uji Normalitas



#### B. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
 Date: 07/13/17 Time: 00:15  
 Sample: 1 46  
 Included observations: 45

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000230	2.255297	NA
D(LN_EDU)	0.033352	4.730436	2.376639
D(LN_HEA)	0.017889	3.209766	2.187100
D(LN_AGR)	0.010065	2.159929	1.785705
ECT	0.010878	1.304854	1.304852

## C. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.158043	Prob. F(14,30)	0.3537
Obs*R-squared	15.78719	Prob. Chi-Square(14)	0.3265
Scaled explained SS	19.94992	Prob. Chi-Square(14)	0.1317

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/13/17 Time: 11:16

Sample: 2 46

Included observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003371	0.002202	1.530882	0.1363
D(LN_EDU)^2	-0.066744	0.329627	-0.202484	0.8409
D(LN_EDU)*D(LN_HEA)	-0.235452	0.393282	-0.598685	0.5539
D(LN_EDU)*D(LN_AGR)	-0.288616	0.279953	-1.030944	0.3108
D(LN_EDU)*ECT	0.288207	0.281674	1.023192	0.3144
D(LN_EDU)	0.076464	0.052512	1.456121	0.1557
D(LN_HEA)^2	-0.172210	0.157607	-1.092654	0.2832
D(LN_HEA)*D(LN_AGR)	0.326323	0.176113	1.852916	0.0738
D(LN_HEA)*ECT	0.004368	0.165886	0.026334	0.9792
D(LN_HEA)	0.001822	0.034103	0.053431	0.9577
D(LN_AGR)^2	0.103380	0.104119	0.992902	0.3287
D(LN_AGR)*ECT	0.292078	0.208602	1.400170	0.1717
D(LN_AGR)	-0.031021	0.027505	-1.127815	0.2683
ECT^2	-0.111563	0.132491	-0.842043	0.4064
ECT	-0.050999	0.025683	-1.985713	0.0563
R-squared	0.350826	Mean dependent var	0.004072	
Adjusted R-squared	0.047879	S.D. dependent var	0.007365	
S.E. of regression	0.007186	Akaike info criterion	-6.772151	
Sum squared resid	0.001549	Schwarz criterion	-6.169930	
Log likelihood	167.3734	Hannan-Quinn criter.	-6.547649	
F-statistic	1.158043	Durbin-Watson stat	1.697950	
Prob(F-statistic)	0.353729			

## D. Uji Autokorelasi

### HASIL UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 7.785489 Prob. F(2,40) 0.0014  
 Obs\*R-squared 12.88919 Prob. Chi-Square(2) 0.0016

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/13/17 Time: 10:33

Sample: 1 46

Included observations: 46

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.055575	0.108133	-0.513950	0.6101
LN_EDU	-0.013641	0.186830	-0.073012	0.9422
LN_HEA	-0.044849	0.152455	-0.294180	0.7701
LN_AGR	0.076579	0.133988	0.571534	0.5708
RESID(-1)	0.351272	0.155415	2.260216	0.0293
RESID(-2)	0.276280	0.156095	1.769942	0.0844

R-squared 0.280200 Mean dependent var -7.22E-16  
 Adjusted R-squared 0.190225 S.D. dependent var 0.110505  
 S.E. of regression 0.099440 Akaike info criterion -1.657410  
 Sum squared resid 0.395535 Schwarz criterion -1.418891  
 Log likelihood 44.12042 Hannan-Quinn criter. -1.568059  
 F-statistic 3.114196 Durbin-Watson stat 1.639321  
 Prob(F-statistic) 0.018183

### HASIL UJI AUTOKORELASI SETELAH KOREKSI AUTOKORELASI DENGAN COCHRANE ORCUTT

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.654399 Prob. F(2,40) 0.0827  
 Obs\*R-squared 5.389785 Prob. Chi-Square(2) 0.0675

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/13/17 Time: 11:19

Sample: 1 46

Included observations: 46

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.046653	0.302352	-0.154302	0.8781
BARU_EDU	0.043578	0.260495	0.167290	0.8680
BARU_HEA	-0.036253	0.252115	-0.143797	0.8864
BARU_AGR	-0.005739	0.107931	-0.053169	0.9579
RESID(-1)	0.354023	0.158295	2.236482	0.0310
RESID(-2)	-0.031224	0.166208	-0.187860	0.8519

R-squared 0.117169 Mean dependent var -3.35E-15  
 Adjusted R-squared 0.006815 S.D. dependent var 0.298958  
 S.E. of regression 0.297937 Akaike info criterion 0.537241  
 Sum squared resid 3.550670 Schwarz criterion 0.775760  
 Log likelihood -6.356553 Hannan-Quinn criter. 0.626592  
 F-statistic 1.061760 Durbin-Watson stat 1.979672  
 Prob(F-statistic) 0.395814